Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Newsletter IX
Januari - Juni 2019



Akuntabilitas


FKPAR


FMS


Cerita Perubahan



Kementerian PPN/ Bappenas

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Konsorsium PERMAMPU

Konsorsium PERMAMPU

Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pimpinan Redaksi	Dina Lumbantobing	Kontributor	Direktur Eksekutif
Sekretaris Redaksi	King Ronald Silalahi		Koord Program
Editor Tulisan	Dina Lumbantobing		Staf Lapang Lembaga Anggota

SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No. 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com Telp/Fax. 061-8361102
Facebook : PermampuConsortium, www.permampu.org

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Selamat bertemu kembali di edisi ke 9 Newsletter kita.
Hari dan bulan begitu cepat berlalu, tanpa terasa Newsletter kita telah hampir menginjak akhir dari tahun kelima. Tinggal kurang dari satu tahun lagi, Program Adokasi HKSR kita berakhir.
Dalam periode ini, seluruh anggota PERMAMPU seluruh anggota Permampu merayakan Hari Perempuan Sedunia yang disebut IWD (International Women's Day) yang dirayakan di bulan Maret, yang secara umum menuntut disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini adalah RUU yang sangat diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan seksual yang semakin tinggi di tahun tahun terakhir ini.
Di bulan yang sama, Permampu meluncurkan Buku mengenai Kepemimpinan Perempuan di ORNOP/LSM Perempuan di pulau Sumatera, belajar dari 4 studi kasus kepemimpinan perempuan, yaitu: Flower Aceh, PESADA SUMUT, LP2M Padang dan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu.
Meski kedua kegiatan besar tersebut menyerap enerji semua anggota Permampu, tetapi pendidikan politik yang secara khusus membantu perempuan potensial yang berasal dari dampingan Permampu maupun perempuan yang meminta dukungan anggota Permampu untuk dapat meperoleh suara pemilih yang cukup untuk duduk sebagai wakil rakyat; terus dilaksanakan di semua tingkatan. Kegiatan ini juga didorong oleh FKPAR dan berhasil mengantarkan 10 perempuan terpilih di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Sementara itu kekuatan ekonomi perempuan melalui kelompok, yang merupakan fondasi kuat untuk keberlanjutan program ini terus meningkat di semua provinsi; dan menjadi modal perempuan untuk dapat bergerak bukan hanya di ranah ekonomi, tetapi juga di kepemimpinan perempuan; terutama untuk mampu mengkases dan mengadvokasi layanan serta kebijakan HKSR untuk Perempuan.

Salam solidaritas.
Dina Lumbantobing.
Koordinator Pelaksana Permampu.

DAFTAR ISI

1. Editorial
2. Salam Redaksi
3. Akuntabilitas
4. FKPAR
5. FMS
6. Cerita Perubahan

Kementerian PPN/ Bappenas
Australian Government
MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Konsorsium PERMAMPU

CAPAIAN PERMAMPU

PERIODE : 1 JANUARI 2018 s/d 30 JUNI 2018

Dalam periode ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan 2019. Adapun indikator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Indikator Permampu Semester I Tahun 2019

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-Laki
1. Jumlah Kelompok Ekonomi. • Jumlah Kelompok • Jumlah Saham • Jumlah Pinjaman Beredar • Sisa Hasil Usaha.	 557 Rp 49.347.045.373 Rp 51.594.479.941 Rp. 9.110.463.264	26.784	0
2. Jumlah perempuan muda yang aktif dan dilatih.	27 kabupaten/kota	2.278	0
3. Jumlah pembatra yang terlibat dalam program.	4 Kabupaten/Kota	158	0
4. Anggota dan Pengurus FMS yang aktif.	26 Kabupaten/Kota	81	49
5. Jumlah kelompok kepentingan yang terlibat dalam program	26 Kabupaten/Kota	6.009	926
6. Jumlah Femokrat	26 Kabupaten/Kota	210	0
7. Jumlah perempuan korban KTP yang ditangani langsung.	26 Kabupaten/Kota	238	0
8. Jumlah perempuan yang difasilitasi mengakses layanan kesehatan.	26 Kabupaten/Kota	1.618	0
9. Jumlah Aparatur Pemerintah terlibat dalam program	26 Kabupaten/Kota	606	401
10. Jumlah tokoh adat yang aktif berdiskusi dan terlibat dalam advokasi kebijakan.	26 Kabupaten/Kota	35	116
11. Jumlah tokoh agama yang difasilitasi	26 Kabupaten/Kota	66	196
12. Jumlah perempuan disabilitas yang dijangkau.	26 Kabupaten/Kota	57	6
13. Jumlah lansia yang dijangkau.	26 Kabupaten/Kota	8.004	23

Penjelasan Capaian Periode 1 Januari - 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pada periode ini, penguatan ekonomi melalui kelompok simpan panjam terus meningkat; dimana dari 557 kelompok dampingan Permampu terdapat sebanyak 497 kelompok (90%) sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku 2018. Per 30 Juni 2019 terdapat total anggota 26.784 orang, saham Rp 49.347.045.373,- dan pinjaman beredar Rp 51.594.479.941 dan Total SHU Rp 9.666.249.189,-. Ini berarti akses terhadap permodalan dan peningkatan kemampuan mengelola Ekonomi Rumah Tangga berjalan cukup baik. Penyelenggaraan RAT merupakan indikator kesehatan sebuah Koperasi Kredit (CU) sekaligus arena demokratis yang menunjukkan posisi anggota sebagai pemegang saham. Kepemimpinan perempuan di kelompok ini menjadi bibit kader yang menjadi inti dari gerakan perempuan akar rumput maupun untuk keberlanjutan.

2. Pada Pemilu Legislatif 2019, telah terjadi peningkatan partisipasi politik FKPAR baik sebagai pemilih kritis, penyelenggara pemilu di tingkat desa, pengawas pemilu independen serta menjadi calon legislative (perempuan potensial).
   Dari 66 perempuan yang menjadi caleg, 57 adalah dari anggota FKPAR sementara 9 orang adalah perempuan yang meminta dukungan ke lembaga, maupun yang menurut analisis pantas untuk didukung.
   Ada 10 yang menang (2 DPD Sumut & Jambi), 1 DPR RI-Sumut, 3 DPRD Tk1 (Sumut, Sumsel, Lampung) dan 4 DPRD Tk 2 (1 Pakpak Bharat, 2 Humbang Hasundutan, 1 Merangin). Pengalaman mendorong perempuan potensial di politik pada Pemilu Legislatif 2019 ini menjadi pembelajaran politik bagi perempuan potensial untuk lebih siap memasuki posisi strategis di kepemimpinan dan dalam menyuarakan kepentingan perempuan khususnya HKSR Perempuan.

3. Implementasi OSS&L semakin berkembang dan mulai berjalannya monitoring pelaksanaan OSS&L dimana temuan monitoring menjadi masukan bagi Puskesmas untuk perbaikan layanan HKSR. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga anggota untuk menyepakati MoU dengan Dinas Kesehatan Langkat yang tadinya cukup seret akhirnya telah teratasi dengan disepakatinya MoU OSS&L tersebut. Ini menjadi petunjuk adanya kesadaran mengenai masalah khusus yang dihadapi perempuan sehubungan dengan HKSR mereka, serta kesediaan untuk menerima LSM Perempuan sebagai mitra kerja. Hingga periode ini telah berjalan Model Layanan HKSR-Gizi (OSS&L) di 17 Puskesmas, yaitu:



Tabel 2. Daftar Puskesmas Implementasi Model Layanan HKSR-Gizi (OSS&L)

Provinsi	Nama Puskesmas	Jumlah
Aceh	• Puskesmas Jambo Aye, Kab Aceh Utara • Puskesmas Grong - Grong, Kab.Pidie • Puskesmas Meuraxa, Kota Banda Aceh	3 Puskesmas
SUMUT	• 2 Nias Barat, • 2 Pakpak Bharat, • 1 Humbang Hasundutan, • 1 Dairi, • 1 Langkat.	7 Puskesmas
Riau	Puskesmas Bagansiapi-api, Kabupaten Rokan Hilir	1 Puskesmas
SUMBAR	Puskesmas Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman,	1 Puskesmas
Jambi.	**1 Pengembangan model layanan Kesehatan Reproduksi dan gizi terpadu** bagi remaja (sinergi pihak sekolah SMP/SLTA sederajat, Puskesmas dan APM)	1 Unit
Bengkulu.	• Puskesmas Talang Tinggi, Kab. Seluma, • Puskesmas Sumber Urip dan Puskesmas Prumnas (Puskesmas Percontohan OSS&L),	2 Puskesmas:
Lampung	• Puskesmas Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung • Puskesmas Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung	2 Puskesmas

4. Untuk semester 1 tahun 2019, ada 14 **kebijakan yang berhasil diadvokas**i oleh Permampu mencakup 4 SK Kerjasama, 3 Peraturan Bupati, 3 Peraturan/SK Gubernur, 2 MoU dengan Puskesmas dan 1 berupa Surat Edara Bupati dan RAD Pencegahan Perkawinan Anak.

5. Untuk semester 1, collective action FKPAR menguat dalam mendukung kepemimpinan perempuan sebagaimana dimuat dalam artikel khusus FKPAR di 8 propinsi. Dari 87 perempuan potensial, terpilih 10 perempuan yang menduduki kursi perwakilan rakyat (DPD & DPR).

Adapun rincian capaian Permampu dalam mendorong kepemimpinan perempuan di arena public dan politis adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perempuan Potensial dalam PEMILU Legislatif Tahun 2019

Perempuan Potensial	Jumlah	Terpilih
1. Caleg dampingan langsung	57	6 DPRD Kabupaten yaitu 2 orang di Pakpak Bharat, 1 orang Humbang Hasundutan, 2 Nias, dan 1 Kab. Merangin, Jambi
2. Caleg dukungan non dampingan	9	4 orang yaitu 1 DPD Jambi, 1 DPD Sumut (Dr. Badikenita) ,1 DPRD Prov.SUMSEL, 1 Kab. Humbang Hasundutan
Jumlah	66	10 orang

SERAPAN DANA SEMESTER 1 TAHUN 2019

Dana Permampu yang telah ditransfer dari MAMPU untuk program tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.051.630.331,- . Sementara Dana Management Overhead yang telah disetor dengan persetujuan laporan keuangan sampai April 2019, adalah sebesar Rp 289.858.079,-. Adapun dana yang digunakan dalam semester ini yang disebut dengan istilah serapan secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Serapan Permampu Januari - Juni 2019

Lembaga	Budget	Realisasi	Saldo	Persentase
Flower	666.561.000	319.302.390	347.258.610	47,90
Pesada	893.980.000	349.411.610	544.568.390	39,08
PPSW	581.927.500	238.709.900	343.217.600	41,02
LP2M	532.645.000	219.165.243	313.479.757	41,15
APM	559.830.000	218.706.200	341.123.800	39,07
CP WCC	622.273.080	223.915.400	398.357.680	35,98
WCC Palembang	465.666.000	175.355.800	290.310.200	37,66
DAMAR	561.639.293	253.988.608	307.650.685	45,22
Host	2.022.775.000	196.472.500	1.826.302.500	9,71
	6.907.296.873	**2.195.027.651**	**4.712.269.222**	**31,78**

Berdasarkan % serapan, tampak bahwa implementasi kegiatan belum sesuai dengan yang diharapkan, khususnya Host. Ini adalah karena kegiatan yang dananya besar sebagian besar baru akan digunakan di Semester kedua 2019. Dengan demikian Management Overhead yang digunakan oleh setiap lembaga adalah seperti tersaji di table di bawah ini:

Tabel 5. Management Overhead Januari - April 2019

Lembaga	Budget	Jumlah	Sisa	Persentase
Flower	133.311.000	45.783.085	87.527.915	34,34
Pesada	178.850.933	44.470.019	134.380.914	24,86
PPSW	116.453.575	32.265.001	84.188.574	27,71
LP2M	106.561.864	27.128.808	79.433.056	25,46
APM	111.957.483	30.059.901	81.897.582	26,85
CP WCC	124.495.013	22.599.063	101.895.950	18,15
WCC Palembang	93.066.283	27.553.380	65.512.903	29,61
DAMAR	111.834.640	38.148.523	73.686.117	34,11
Host	366.172.336	21.850.299	344.322.037	5,97
Total	**1.342.703.127**	**289.858.079**	**1.052.845.048**	

FORUM KOMUNITAS PEREMPUAN AKAR RUMPUT (FKPAR)



FKPAR Aceh

Pertemuan regular kelompok perempuan madiri (KPM) Flower Aceh yang tergabung dalam FKPAR pada semester ini dilakukan secara rutin, dan berdampak pada semakin menguatnya kesadaran kritis perempuan akar rumput terkait HKSR yang ditandai dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan baik di tingkat Desa (Posyandu, Poswindu, OSSL) juga di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Kelompok perempuan juga aktif secara terbuka melakukan diskusi terkait isu KSR melalui diskusi – diskusi kelompok atau majelis taklim, serta rutin lakukan konsultasi seputar KSR dan pemeriksaan KSR (tes IVA, pubsmeer dan SADARI).

Sementara itu, kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan menduduki posisi strategis/ pengambilan keputusan baik di parlemen (DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD) ditunjukkan dengan komitmen kelompok perempuan dalam memberikan dukungan terhadap keterpilihan caleg perempuan, dan ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawalan suara/pemantauan pada Pemilu 2019 di Aceh. Peran yang dijalankan sebagai pemantau dan panitia penyelenggara Pemilu dengan tujuan utama memastikan pemilih yang kondusif, bersih dan adil untuk perempuan berkompetisi serta untuk mengawal suara perempuan.

Kesadaran kritis perempuan menjadi pemimpin di desa dibuktikan dengan partisipasi aktif perempuan di ranah publik dan strategis di tIngkat Desa. Pada periode ini perempuan akar rumput telah mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan baik sebagi Tuha peut/DPR di tingkat desa, Tokoh adat, Tokoh Agama, Kader Pemberdayaan Manusia.

Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Aceh pada periode ini turut serta dalam menyikapi persoalan yang dihadapi perempuan di Aceh. FKPAR terlibat aktif dalam aksi bersama dengan mitra MAMPU-Peduli dan gerakan perempuan Aceh (jaringan perempuan akar rumput dan organisasi penguatan perempuan di Aceh) di semua tingkatan untuk advokasi pemenuhan hak kesehatan-HKSR dan hak-hak asasi perempuan, di antaranya melalu aksi damai IWD 2019 yang menuntut disahkannya RUU PKS sebagai payung hukum perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dan pelaksanaan Pemilu bersih 2019 agar menciptakan situasi Pemilu yang kondusif dan nyaman bagi caleg perempuan untuk berkompetisi secara adil.



Aksi damai *long march* dan orasi dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia 2019 "Stop Kekerasan Terhadap Perempuan, Sahkan RUU PKS"

Aksi Kolektif pada 8 Maret 2019 juga di sertai dengan Kegiatan Diskusi Publik tentang RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual, di Kabupaten Pidie kegiatan diskusi Publik menghadirkan narasumber dari perwakilan Femokrat, Zubaidah, S.Ag dan Koordinator Program Divisi Pemas, Ernawati di Kafe Fresrock, Sigli. Sebanyak 60 peserta terlibat dalam kegiatan ini yang terdiri dari perwakilan FKPAR dan perempuan muda. Sedangkan di Aceh Utara diskusi melibatkan 25 perwakilan kelompok muda dengan fokus pembahasan tentang pentingnya pengesahan RUU PKS untuk menjawab berbagai persoalan terutama kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi di Aceh dan menunjukan tren peningkatan. Diskusi juga membedah tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak tercantum dalam regulasi di Indonesia, seperti pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.

Di Banda Aceh diskusi publik menghadirkan Presidium Balai Syura, Norma Susanti, pimpinan RPUK, Laila Juari dan pendiri Flower Aceh, Suraiya Kamaruzzaman sebagai narasumber. Diskusi ini membedah subtansi dari RUU PKS dan pengalaman pengalam RPUK dalam penanganan kasus–kasus kekerasan seksual, serta mendorong insiatif masyarakat dan aparatur desa untuk melahirkan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak secara komprehensif.

FKPAR juga terlibat aktif pada kampanye gerakan penghapusan stunting (GeuNTING) di Aceh bersama pemerintahan dan multipihak, serta aksi bersama dengan elemen sipil lainnya di Aceh untuk advokasi HAM: bersama WALHI dan mahasiswa melakukan aksi tolak tambang dan pencabutan izin PT EMM di Beutong Ateuh yang dampak lingkungannya merugikan kesehatan perempuan, deklarasi damai untuk Pemilu bersih dan berpihak pada lingkungan bersama gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa Aceh (Gema 2019).
Upaya advokasi juga dilakukan dengan melakukan audiensi dengan para pengambil kebijakan; audiensi

dengan Bappeda dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh, serta audiensi dengan 3 kepala Puskesmas di 3 Kabupaten.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 yang berintegritas dan adil, FKPAR mengambil peran strategis melalui keterlibatan aktif dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019 sebagi panitia penyelenggara Pemilu di tingkat desa (KPPS), pengawas TPS, saksi partai politik, serta tim pemantau Pemilu Flower Aceh dengan fokus pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu bersih dan aksesibilitas TPS terhadap Lansia, disabilitas, Ibu hamil dan menyusui.

Rapat Tahunan pengurus FKPAR Aceh di gelar pada April 2019 untuk melihat capaian serta tantangan dalam menjalankan rencana kerja tahun 2018, sekaligus menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas pengurus FKPAR melalui forum pengayaan yang dilaksanakan dalam bentuk talkshow dan diskusi interaktif dengan menghadirkan Ibu Plt. Gubernur Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Aceh /Ketua LIRA Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT.

FKPAR Sumatera Utara

Pada semester ini, FKPAR Pesada banyak terlibat dalam kegiatan advokasi dan kampanye pemenangan perempuan dalam Pemilu melalui diskusi kritis dan perayaan hari perempuan internasional. Perayaan IWD dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Nias Barat dan Langkat, acara yang dihadiri 445 orang perwakilan anggota CU, FKPAR, SPUK, FMS dan FPM dengan tema " Pilih Celeg Perempuan dan Jangan Golput. Selain diskusi kritis caleg menyampaikan visi misi dan melakukan kontrak politik melalui SPUK (Suara Perempuan Untuk Keadilan).



Dok. Photo peserta Perayaan IWD dengan Caleg Perempuan Wilayah Dairi

FKPAR Sumatera Utara telah melakukan rangkaian advokasi seperti memastikan pengelolaan OSS&L di Puskesmas, kampanye kepemimpinan perempuan dan mendorong untuk mendukung, memilih caleg perempuan dan seruan tolak politik uang dan tidak golput. Hingga periode ini terdapat 15.763 anggota FKPAR telah mendapatkan pelayanan HKSR dari total peserta FKPAR 17.924 melalui diskusi bulanan, 129 orang melakukan pemeriksaan IVA, menjadi penyelenggaran Pemilu 274 orang. Selain itu FKPAR terlibat dalam pengelolaan OSS&L di 6 Puskesmas wilayah dampingan Pesada untuk menerima informasi terkait pelayanan HKSR perempuan. Untuk pemilihan legislatif 2019 terdapat dua orang perempuan potensial anggota FKPAR yang berhasil lolos menjadi Anggota DPRD di Kab. Pakpak Bharat dan Kab. Humbang Hasundutan.

CUB yang merupakan fondasi penguatan perempuan melalui penguatan ekonomi per Juni 2019 berjumlah 363 unit dengan 21.261 anggota (terdiri dari anggota regular 17.924 dan anggota istimewa: 2.265 perempuan & 1.781 laki-laki. Jumlah saham Rp. 40.921.384.783,- dan pinjaman beredar Rp. 43.111.851.69. RAT (Rapat Anggota Tahunan) telah terlaksana dengan total SHU Rp. 4.619.968.392,-

Femokrat cukup berkembang di wilayah dampingan Pesada, sebanyak 49 perempuan terdiri dari Kabupaten Pakpak Bharat 25, Dairi 6,Humbang Hasundutan 6,Langkat 3,Nias Barat 6,Nias 3 orang. Untuk peningkatan kapasitas Femokrat telah dilaksanakan pertemuan tingkat kabupaten dan propinsi, sehingga diharapkan para femokrat memiliki persfektif gender dalam menyusun program dan anggaran dalam mewujudkan capaian SDGs pada tujuan 5 yaitu kesetaraan gender.

FKPAR Riau

Pertemuan FKPAR tingkat Propinsi Riau sekaligus untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia (HPS/ IWD) tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 7 – 8 Maret 2019 di Hotel Grand Zuri Pekanbaru. Perayaan IWD ini mengangkat tema "Menyambut Pemilu Serentak 2019: Strategi Advokasi Kebijakan Pememuhan HKSR dan Gizi Perempuan Serta Pemenangan Caleg Perempuan". Pada acara ini penguatan FKPAR Provinsi Riau dimulai dengan membahas review rencana kerja FKPAR Riau, strategi advokasi dan pemenangan caleg perempuan dan kemudian pada tanggal 8 Maret 2019 FKPAR melakukan audiensi dengan KPU Prov. Riau untuk mengetahui Tata Cara Pemilu Serentak 2019 yang dihadiri oleh ketua KPU Riau. Pertemuan FKPAR Riau dihadiri oleh 35 orang yang terdiri dari 32 orang perempuan dan 3 orang laki-laki.

Pada tanggal 10 Maret 2019 FKPAR Riau, PPSW Sumatra bersama Koalisi Anti Diskriminasi (KASAI) menggelar aksi bersama International Women's Day (IWD) dengan melibatkan masyarakat umum yang bertempat di Ruang Terbuka Hijau Putri Kaca Mayang. Tema yang diangkat pada IWD 2019 adalah "Perempuan

Indonesia bersatu dan berjuang bersama rakyat melawan diskriminasi". Kegiatan aksi bersama diikuti oleh sejumlah aktivis perempuan dari PPSW Sumatra, RUPARI, LSM dan organisasi Perempuan di Pekanbaru. Dalam aksi bersama tersebut KASAI Riau menyampaikan 13 tuntutan, yaitu: 1) hentikan seluruh bentuk persekusi terhadap Perempuan Pejuang HAM; 2) hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan; 3), jalankan *land reform* dan distribusi tanah bagi petani perempuan; 4) perbaiki upah perempuan buruh pabrik dan buruh di perkebunan; 5) perbaiki kondisi kerja perempuan buruh pabrik dan buruh tani di perkebunan; 6) berikan kepastian kerja bagi perempuan buruh pabrik dan buruh tani di perkebunan; 7) hentikan penggusuran atas nama infrastruktur dan percepatan pembangunan; 8) turunkan harga kebutuhan pokok, bebaskan buruh tani dan rakyat miskin dari pajak dan berbagai pungutan lainnya; 9) libatkan perempuan yang tertindas dalam setiap pengambilan keputusan; 10) berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat bagi perempuan terutama perempuan buruh dan tani di pedesaan; 11) segera sahkan RUU PKS; 12) hapuskan budaya patriarki serta realisasikan kesetaraan gender dalam struktur politik, ekonomi , sosial dan budaya; 13) berikan cuti haid, cuti melahirkan kepada pekerja perempuan.

Dalam aksi tersebut PPSW Sumatra juga menyuarakan issu Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi yang didanai program MAMPU menyuarakan "Stop Kekerasan terhadap Perempuan"; "Stop Perkawinan Usia Anak"; "Stop Kekerasan Seksual"; "Penuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan". Hidup perempuan Indonesia.

FKPAR Kab. Rokan Hilir melakukan pertemuan Triwulan pada tanggal 4 April 2019. Pertemuan ini dihadiri oleh 13 orang pengurus dan anggota dengan membahas tentang keberadaan secretariat FKPAR Rohil, kebutuhan sekretariat seperti stempel, struktur pengurus, dan rencana kerja serta rencana kerja 3 bulan kedepan. yaitu: a) Audiensi ke kepala desa Sungai Sialang Hulu, b) Audiensi ke Puskesmas Rimba Melintang, c) Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perempuan Sinar Harapan, d) Melakukan diskusi strategi pemenangan caleg perempuan terutama dari FKPAR, e) Pendataan anggota FKPAR Rokan Hilir.



Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial

FKPAR Riau turut memperjuangan pemenangan 3 orang caleg perempuan yang berasal dari anggota FKPAR dalam Pemilu legislative di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru. Namun ketiga peremuan potensial belum berhasil lolos. Berbagai penyebab yang membuat belum menangnya caleg dari FKPAR salah satunya adalah maraknya politik uang yang dilakukan caleg lain dan kurangnya persiapan dari Caleg itu sendiri.

FKPAR Sumatera Barat

FKPAR SUMBAR aktif terlibat dalam mengkampanyekan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Perempuan (RUU P-KS) dalam Peringatan Hari Perempuan Internasional (*International Womens Day*/IWD) 2019 dengan tema "Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)". Kegiatan Aksi Kolektif dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada 6 dan 10 Maret 2019.

Tanggal 6 Maret 2019 dilakukan melalui Kegiatan Diskusi Kritis tentang RUU P-KS bersama narasumber dari akademisi Universitas Andalas (Prof. Afrizal) dan aktivis perempuan (Tanty Herida) di Kantor LP2M, Padang. Sebanyak 41 orang (38P dan 3L) terlibat dalam kegiatan ini yang terdiri dari perwakilan FKPAR dan FMS dari 3 kab./kota (Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar). Diskusi kritis membahas tentang isi RUU P-KS. Terdapat lima poin penting yang diatur dalam RUU P-KS, yaitu:1) ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak tercantum dalam regulasi (pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual), 2) ada terobosan prosedur hukum yang lebih sensitif dan memperhatikan pengalaman korban, 3) ada integrasi layanan (korban mendapatkan layanan pemulihan fisik, psikologis, materil, hingga hukum secara bersama), 4) ada jaminan hak korban, serta 5) ada penanganan dan pemahaman paradigma publik terhadap kasus kekerasan seksual agar korban tidak disingkirkan. Rancangan UU P-KS dinilai mampu mengisi kekosongan hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui. Rancangan UU P-KS ini merupakan upaya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam hubungan sosial yang masih timpang. Rancangan UU P-KS dibuat dengan memandang perempuan sebagai subjek.



Aksi Bersama Peringatan Hari Perempuan Internasional bersama JPP

Pada 10 Maret 2019, Aksi Kolektif dilakukan melalui Kegiatan *Long March*, Orasi, Puisi, Akustik, *Garage Sale*, dan Cek Kesehatan bekerja sama dengan berbagai LSM yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan (JPP) Sumatera Barat di Acara *Car Free Day* Kota Padang. Sebanyak 45 orang perempuan dari berbagai LSM anggota JPP Sumbar berpartisipasi dalam kegiatan ini, antara lain PKBI, Nurani Perempuan WCC, *Pembangkik Batang Tarandam* (PBT), LP2M, Walhi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan lainnya. Melalui kegiatan ini, LP2M bersama LSM anggota JPP menyatakan dukungan untuk segera disahkannya RUU P-KS. (Sri Ambarwati – LP2M)

FKPAR Jambi

Anggota FKPAR yang mengakses layanan pada periode Januari – Juni 2019 sebanyak 173 perempuan melakukan deteksi dini kanker payudara Sadari, 165 melakukan IVA test, 32 melakukan Papsmear dan 28 orang mendapat layanan konseling dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan advokasi, kampanye Pencegahan pernikahan diusia anak, stunting dan pemenangan perempuan dalam Pemilu dilakukan melalui diskusi kritis reguler dan dalam moment perayaan hari perempuan internasional pada bulan Maret 2019.

Menghadapi Pemilu 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Legislatif, APM melakukan pendidikan politik cerdas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula bekerja sama dengan KPUD Kab.Merangin. APM menjadi bagian sebagai Tim Relawan Demokrasi/Tim Relasi KPUD Kabupaten Merangin. Melalui kelompok, APM mengajak anggotanya untuk mengawasi, mengawal bahkan terlibat dalam proses pemilu untuk mendukung perempuan dan pemimpin yang memilki keberpihakan terhadap perempun serta menghindari politik uang dan politisasi perempuan dan sara. Satu orang perempuan kader CC. Harapan Sehat berhasil lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 - 2024.

Dalam pertemuan tanggal 19 Juni, FKPAR Jambi merefleksikan pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif pada 17 April 2019, baik yang terlibat dalam PPS, KPPS, Panwas di TPS, Saksi, relawan demokrasi maupun sebagai pemilih. Pembelajaran dari proses Pemilu menurut sharing pengalaman anggota FKPAR adalah:

1. Caleg perempuan masih diragukan kemampuannya/ belum dipercaya,
2. Politik uang semakin marak terjadi,
3. Pemimpin Partai politik masih menjadi pertimbangan bagi pemilih (muslim non muslim)
4. Caleg perempuan yang ada kurang populer di masyarakat, kurang mensosialisasikan dirinya sehingga masyarakat tidak tahu visi dan misinya
5. Kader perempuan yang menjadi penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan untuk mensosialisasikan caleg perempuan karna aturan
6. Untuk menghindari kecurangan dan hilangnya suara perempuan, pengawalan dari proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS, PPS tingkat desa, kecamatan hingga pleno di KPU, kelompok perempuan harus mengawal ketat.
7. Pemilihan presiden dan anggota legislatif serempak memang menghemat anggaran, namun rumit dan melelahkan.



Pemenangan perempuan potensial FKPAR Jambi

FKPAR Bengkulu

FKPAR Kota Bengkulu pada 2 Juni 2019 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, PKM Pasar Ikan, DP3A&KB Kota dan KORAMIL melakukan pelayanan pemeriksaan darah; tensi, asam urat, kolestrol, konsultasi kesehatan dan pemberian obat jika diperlukan. Selain itu, juga dberikan pelayanan pemaksaan Alat Kontrasepsi yaitu IUD, Implan, Suntik dan Pil KB Gratis untuk Perempuan di Kecamatan Teluk Segara (salah satunya Kelurahan Berkas – anggota Kelopon CU Raflesia Berkas - Dampingan CP WCC). Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di lapangan Kelurahan Berkas. Dalam kegiatan tersebut kelompok CU reflesia Berkas mengkoordinir 23 Balita, 25 Ibu Hamil, 26 orang Lansia, 28 orang perempuan yang membutuhkan layanan Alkon dan 4 orang Tes IVA. Secara keseluruhan ada 106 warga kelurahan Berkas. Selebihnya terdapat warga dari Kelurahan Pasar Malebro, Kelurahan Pasar Baru,

Kelurahan Sumur Melele dan Kelurahan Jitra berjumlah sekitar 550 orang di wilayah Kecamatan teluk Segara, Kota Bengkulu.



Foto Aksi Kolektif FKPAR Kota Bengkulu

Tujuan kegiatan ini adalah mendekatkan dan memudahkan perempuan dan Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan murah (tanpa bayar). Kegiatan kerjasama FKPAR Kota Bengkulu bersama OPD terkait dirasakan manfaatnya oleh masyarakt setempat kelurahan Berkas dan kelurahan lainnya.

Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi Lansia, Ibu Hamil, dan mendorong Perempuan Muda/remaja di kelurahan Berkas dan kelurahan sekitarnya untuk selalu rutin memeriksakan kesehatan di pusat pelayanan, baik itu Puskesmas dan atau Posyandu setempat. Kegiatan bersama ini sangat membuat Puskesmas Pasar Ikan terbantu dalam pencapaian target pelayanan (tingkat partisipasi aktif warga) dalam pelayanan kesehatan. Selama ini pihak PKM Pasar Ikan sulit melakukan mobilisasi warga, dan itu merupakan kewenangan dari pihak kecamatan dan kelurahan setempat.

Forum Perempuan Muda (FPM) Bengkulu memperingati Perayaan IWD Maret 2019 dengan melakukan rangkaian Aksi Kolektif itu dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 Maret 2019 meliputi : 1) Roadshow to Campus" Bicara Kekerasan Seksual di Kalangan Kampus, 2) Gerak Bersama Perempuan Muda Tuntut Ruang Publik Yang Aman dan Terbebas dari Kekerasan Seksual". Roadshow to Campus bekerja sama Himapaud Universitas Bengkulu, Dema IAIN Bengkulu, BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu, BEM Poltekes Kemenkes RI, Hima PTIK & BEM Universitas Dehasen. Sekitar 30 orang Anak Muda Kampus berbincang mengenai Kekerasan Seksual dengan para narasumber antara lain Sawitri (Aktivis Perempuan & Konsultan ASV, Jakarta), Evi Elvina Dwita (Kordiv. Pelayanan/ Advokat CP WCC), Nurkholis (Pengurus PKBI Bengkulu), dan Tini Rahayu (Kordiv. APK CP WCC). Dalam roadshow ini disepakati: a) Bincang Seputar Kekerasan Seksual & Kekerasan Berbasis Gender menjadi diskusi periodik di kampus untuk mempertajam pemikiran kritis kaum muda kampus mengenai akar kekerasan berbasis gender & seksual. b), perlu pertemuan lanjutan untuk menyusun mekanisme pencegahan & penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. c), menguatkan komitmen dan partisipasi aktif para aktifis kampus dalam kampanye penghapusan kekerasan seksual termasuk di dalamnya kampanye pencegahan perkawinan di usia anak.



Teaterikal Menghapus Kekerasan Seksual Komunitas Seni XGO/Foto dok. CP WCC

Di puncak perayaan IWD, FPM menggelar kegiatan Apresiasi Seni dan Body Painting di Taman Pantai Berkas, Kota Bengkulu bekerjasama dengan komunitas seni anak muda XGOs. Beragam apresiasi seni ditampilkan oleh peserta seperti pembacaan puisi, bernyanyi dan mencoret tubuh dipilih sebagai wadah kreatif untuk membincang kekerasan seksual. Perwakilan FPM Tingkat Provinsi Bengkulu dan 150 perempuan dan laki-laki muda aktifis kampus, OPD terkait (DP3APPKB, Diknas, Dinkes) dan Sub Mitra MAMPU di Bengkulu, LS/Ormas lainnya serta masyarakat umum di sekitar tempat kegiatan hadir dan terlibat dalam kegiatan bersama-sama membacakan lembar Dukungan Pengesahan RUU P-KS kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU P-KS sebelum pemilu tahun 2019.

FKPAR Palembang

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2019, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumsel terlibat didalam diskusi publik dengan tema "Berfikir dan Bertindak Kritis untuk Pemenuhan Hak-hak Perempuan" serta terlibat aktif dalam aksi kolektif mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Aksi kolektif digelar di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim dan Simpang Polda Kota Palembang, melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas untuk mendorong pengesahan RUU P-KS dan menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Aksi simpatik yang dilakukan berupa pembagian bunga dan *info sheet* hak-hak perempuan, dan penggalangan tanda tangan ke masyarakat dan pemerintah.

Untuk membekali pengurus FKPAR Sumsel, dipelajari seperangkat pengetahuan teknis dan keterampilan praktis untuk mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya komunitas dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik pada lingkup keluarga, komunitas, maupun Negara. Pendidikan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 berupa pelatihan "Kepemimpinan Perempuan untuk Pemenuhan Hak-hak Perempuan". Semua pengurus FKPAR Sumsel menjadi peserta pelatihan. Pelatihan ini bertujuan agar anggota FKPAR Sumsel mendapatkan pemahaman dasar kepemimpinan feminist, mengetahui mengapa perlu perempuan menjadi pemimpin serta mengetahui tantangan kepemimpinan perempuan di komunitas.



Rapat Pengurus FKPAR Sumsel di Kota Palembang.

Pada akhir bulan Juni 2019 tepatnya tanggal 27 Juni, Pengurus FKPAR Sumsel melakukan pertemuan/rapat rutin untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran. Agenda pertemuan periode ini adalah *review* isu dan pelaksanaan kepemiluan, pemilihan keluarga peduli HKSR dan penggunaan buku pegangan orang tua terkait kesehatan tubuh sekaligus sharing pengalaman dan pembelajaran dari salah satu pengurus FKPAR Sumatera Selatan yang menjadi caleg di Kab. Banyuasin. Selain itu diinformasikan dan dibahas juga mengenai masalah perkawinan anak sekaligus disusun strategi kampanye dan aksi kolektif untuk penghapusan perkawinan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

FKPAR DAMAR Lampung

Pengembangan pengelolan Credit Union merupakan gerakan untuk penguatan ekonomi anggota FKPAR. Di FKPAR Lampung terdapat 2 kelompok yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin, yakni kelompok CU Mandiri Sejahtera Desa Tegal Ombo Kec. Waybungur-Lampung Timur dan kelompok CU Srikandi-Desa Kalisari Kec. Natar-Lampung Selatan. Dengan adanya RAT membangun kepercayaan anggota untuk menabungkan uangnya ke CU dan adanya pembentukan 2 kelompok unit baru yaitu CU Sukses Makmur-Desa Tegal Ombo-Lampung Timur dan CU Harapan Sejahtera II-Desa Taman Negeri-Lampung Timur.



Suasana pemeriksaan saham dalam RAT CU

Pada 2019, terdapat total 8 kelompok CU yang didampingi melakukan perhitungan SHU dan telah melakukan RAT dan pembagian SHU dengan **total SHU Rp. 37.694.000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Kelompok CU - Damar

Nama CU	Jumlah SHU
Anggrek-Pekon Wayharong Tanggamus	Rp. 3.667.000
Srikandi-Desa Kalisari-Lampung Selatan	Rp. 10.083.500
Hidayah-Desa Mandah-Lampung Selatan	Rp. 10.127.000
Harapan Sejahtera-Desa Taman Negeri-Lampung Timur	Rp. 6.706.000
Mandiri Sejahtera-Desa Tegal Ombo-Lampung Timur	Rp. 3.912.500
Barokah-Desa Sumber Agung-Lampung Timur	Rp. 1.259.000
Mekar Abadi-Desa Gayabaru II-Lampung Tengah	Rp. 833.000
Permadani-Kecamatan Panjang-Bandarlampung	Rp. 1.106.000

Hingga periode ini, Kelompok ekonomi perempuan miskin desa/kota berbasis simpan pinjam anggota FKPAR yang didampingi oleh DAMAR berjumlah 1.064 anggota dari 36 kelompok yang tersebar di 17 desa dari 5 Kabupaten/kota (Bandarlampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus). Total **tabungan Rp. 632.421.500** dengan **pinjaman beredar 443.279.540.**

Pada 17 April 2019, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR mendorong 14 caleg Perempuan potensial gerakan perempuan Lampung dalam kontestasi pemilu legislatif. Baik DPR tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota meskipun ke 14 caleg perempuan belum berhasil lolos memperoleh kursi di DPR.
Ditingkat penyelenggara pemilu baik Panitia Penyelenggara TPS, PPS, Pengawas dan Saksi. Terdapat 114 anggota dan kader gerakan perempuan Lampung berpilih. 8 diantaranya adalah perempuan muda dan laki-laki muda. Tersebar di 32 desa, 9 Kecamatan di 5 kabupaten/kota.

Tabel 7. Rekap Anggota FKPAR Permampu Per Juni 2019

Propinsi	Kab/Kota	Jumlah kel	Total Anggota
Aceh	Banda Aceh	4	132
	Pidie	7	210
	Aceh Utara	7	337
	Jumlah	18	679
Sumatera Utara	Dairi	74	3,980
	Pakpak Bharat	64	3,198
	Humbang Hasundutan	18	636
	Medan/Langkat	17	376
	Tapteng	20	564
	Singkil	2	58
	Samosir	12	249
	Jumlah	207	9,061
Riau	Rokan Hilir	4	2,169
	Pekan Baru	78	62
	Kampar	5	125
	Jumlah	87	2,356
Sumatera Barat	Padang	7	158
	Padang Pariaman	6	111
	Tanah Datar	10	205
	Jumlah	23	474
Jambi	Merangin	18	458
	Bungo	5	119
	Sarolangun	5	111
	Jumlah	28	688
Bengkulu	Kota Bengkulu	5	626
	Kabupaten Rejang Lebong	5	476
	Kabupaten Seluma	5	604
	Jumlah	15	1,706
Sumatera Selatan	Kab OKI	1	16
	Kota Palembang	2	51
	Kab Muara Enim	2	66
	Kab Banyuasin	1	28
	Jumlah	6	161
Lampung	Kabupaten Lampung Timur	11	439
	Kota Bandar Lampung	8	499
	Kabupaten Lampung Tengah	21	598
	Kabupaten Lampung Selatan	9	443
	Kabupaten Tanggamus	38	1285
	Kab.Lampung Utara	22	551
	Jumlah	109	3,815
	Total	**493**	**18,940**

Tabel 8. Rekap CU dampingan Anggota Permampu Per Juni 2019

Propinsi	Kab/Kota	Unit	Anggota	Total Saham	Total Pinjaman	Jlh unit yang sdh RAT	% unit yang sudah RAT	Total SHU
Aceh	Banda Aceh	5	132	18,000,000	850,000		0%	
	Pidie	5	79	18,891,000	1,300,000			
	Aceh Utara	2	296	47,258,000	30,000,000			
	Jumlah	12	507	84,149,000	32,150,000	-		-
Sumatera Utara	Kab. Dairi	74	5,649	9,914,103,807	10,715,554,307	Sudah pra-RAT di unit dan RAT untuk tingkat CUB	100%	**7,952,260,877**
	Kab. Pakpak Bharat	64	4,350	8,091,150,231	8,133,238,369			
	Kab. Humbang Hasundutan	18	923	934,348,937	920,151,248			
	Medan-Langkat,	17	416	370,910,467	611,606,700			
	Tapanuli Tengah	20	665	721,469,139	1,154,278,501			
	Singkil	2	68	56,401,600	54,238,416			
	Samosir	12	327	246,063,440	298,322,403			
	Nias & Kota Gunungsitoli	60	3,561	8,618,741,452	8,487,984,597			
	Nias Barat	26	1,345	3,290,790,365	2,890,340,000			
	Nias Utara	34	2,298	5,011,732,522	4,996,002,800			
	Nias Selatan	35	1,695	2,459,109,645	3,565,948,275			
	Jumlah	**362**	**21,297**	**39,714,821,605**	**41,827,665,616**	**362**		**7,952,260,877**
Riau	Pekan Baru	4	62	16,460,000	10,990,000	4	**100%**	9,425,000
	Rokan Hilir	78	2,169	7,194,822,760	8,189,650,800	78		1,110,356,475
	Kampar	5	125	13,766,000	12,890,000	5		303,100
	Jumlah	**87**	**2,356**	**7,225,048,760**	**8,213,530,800**	**87**		**1,120,084,575**
Sumatera Barat	Padang	7	156	154,100,289	121,168,500	1		19,005,498
	Padang Pariaman	7	128	14,539,000	14,515,000	1		225,000
	Tanah Datar	10	199	61,807,000	50,305,000			
	Jumlah	**24**	**483**	**230,446,289**	**185,988,500**	**2**	**8.33%**	**19,230,498**
Jambi	Merangin	12	334	240,061,000	234,032,000			
	Jumlah	**12**	**334**	**240,061,000**	**234,032,000**	**0**	**0%**	-
Bengkulu	Kota Bengkulu	5	114	22,476,500	12,350,000			
	Kabupaten Rejang Lebong	5	81	40,196,000	25,272,000			
	Kabupaten Seluma	5	127	51,691,190	40,308,000	1		604,228
	Jumlah	**15**	**322**	**114,363,690**	**77,930,000**	**1**	**6.67%**	**604,228**

Tabel 8. Rekap CU.....

Propinsi	Kab/Kota	Unit	Anggota	Total Saham	Total Pinjaman	Jlh unit yang sdh RAT	% unit yang sudah RAT	Total SHU
Sumatera Selatan	Kab OKI	1	16	11,563,000	6,430,000			
	Kota Palembang	2	51	82,761,000	72,872,000	1		325,000
	Kab Muara Enim	4	108	261,453,039	239,640,085	2		4,141,586
	Kab Banyuasin	1	28	31,933,000	10,600,000			
	Jumlah	**7**	**187**	**376,147,039**	**323,112,085**	**3**	**43%**	**4,466,586**
Lampung	FAKTA Tanggamus	22	704	483,176,000	270,530,540	1		3,667,000
	SEPALAS-Lampsel	3	140	62,333,000	57,600,000	2		20,210,000
	Perempuan Timur-Lamtim	7	154	62,003,000	85,580,000	3		11,877,500
	FAK Lamtengah	3	36	16,698,500	22,869,000	1		833,000
	SPL_Bandar Lampung	1	30	8,211,000	6,700,000	1		1,106,000
	Jumlah	**11**	**220**	**86,912,500**	**115,149,000**	**5**	**45%**	**13,816,500**
TOTAL		**530**	**25,706**	**48,071,949,883**	**51,009,558,001**	**460**		**9,110,463,264**



FORUM MULTI STAKEHOLDER (FMS)





FMS Aceh

Pertemuan reguler FMS di kabupaten/kota Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara terfokus pada advokasi kota layak anak. Issu Kota Layak Anak memiliki target indikator yang sangat terkait erat dengan pemenuhan HKSR perempuan di tingkat desa. Berikut indikator kota/kabupaten layak anak yang sangat mendukung pemenuhan HKSR perempuan di desa: **Pertama**, Isu kesehatan dasar dan kesejahteraan: meliputi indikator 11. Persalinan di Faskes, 12. Prevelensi gizi, 13.PMBA, 14. Faskes dengan pelayanan ramah anak, 15.Air minum dan sanitasi, 16.Kawasan tanpa rokok. **Kedua,** isu Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi indicator 7.Perkawinan anak, 8.Lembaga konsultasi orang tua/keluarga, 9.Lembaga pengasuhan anak. **Ketiga** terkait isu Perlindungan khusus meliputi indicator 21.Korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, 23.Penyandang disabilitas.

Komitmen untuk pembentukan Kabupaten/Kota layak anak juga mendapat respon dan dukungan penuh oleh Femokrat di 3 kabupaten/kota. Femokrat berkomitmen untuk mendukung upaya pemenuhan HKSR dan hak perempuan melalui perannya di pemerintah dengan mendorong peningkatan anggaran untuk P2TP2A, dukungan terhadap percepatan lahirnya peraturan Bupati Aceh Utara tentang KIBBLA sebagai aturan lanjutan untuk pelaksanaan Qanun KIBBLA Aceh Utara, percepatan pelaksanaan RAD SDGS Aceh dan Kabupaten/Kota Aceh Utara, Banda Aceh dan Pidie dan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Di Aceh Utara, pertemuan FMS juga membahas usulan dalam Peraturan Bupati tentang layanan visum gratis kegiatan yang berlangsung pada tanggal 21 Maret ini di hadiri oleh 32 orang peserta terdiri dari 24 perempuan dan 8 Laki- laki yang merupakan perwakilan LSM, Instansi Pemerintah dan juga pemberi layanan. Melalui pertemuan ini menghasilkan usulan agar diberlakukan keringanan biaya visum yang nantinya akan di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Aceh Utara. Pada saat yang sama, pihak rumah sakit umum (RSU) Cut Meutia selaku pemberi layananan akan menindaklanjuti secara internal untuk merumuskan mekanisme layanan visum khusunya terhadap perempuan korban dan dalam kondisi miskin yang dibuktikan dengan adanya surat rujukan atau pendampingan dari P2TP2A setempat. Untuk pelaksanaannya, RSU Cut Meutia membutuhkan dukungan dari Pemerintah Aceh Utara.



Forum Femokrat di Banda Aceh

FMS Sumatera Utara

Diskusi reguler FMS di semester pertama terlaksana di 6 kabupaten yakni Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Langkat, Nias & Nias Barat dengan focus diskusi mengenai evaluasi pencapaian hasil rencana kerja selama 1 tahun yang telah dilaksanakan oleh FMS bersama dengan Pesada, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 dan juga melengkapi kepengurusan FMS. Di Semester ini peningkatan kapasitas yang diberikan tentang PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dan turunannya yaitu UU No. 36/2009 psl 75 tentang aborsi aman.

Adapun ruang lingkup PP No. 61 tahun 2014 adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu
b. Indikasi Kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi
c. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah.

FMS terlibat dan aktif menjadi fasilitator diskusi HKSR bagi remaja desa/gereja/mesjid, penyadaran

gender untuk kaum laki laki/suami anggota CU, terlibat audiensi di pemerintahan untuk advokasi kebijakan PERBUP batasan pernikahan di Kabupaten Nias Barat dan MoU OSS&L untuk pemenuhan HKSR & Gizi Perempuan di Kabupaten Langkat. FMS juga berperan saat ada kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang berhubungan dengan nilai setempat, untuk menekan keputusan-keputusan keluarga besar atau masyarakat yang tidak mekihak kepada hak-hak perempuan. Antara lain kasus perdamaian kekerasan seksual oleh masyarakat, serta kegiatan lainnya di wilayah dampingan Pesada.



FMS Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat
Diskusi Kritis tentang PP 61/2014 tentang aborsi aman.

FMS Riau

Pertemuan Forum Multi Stakeholder (FMS) tingkat Propinsi Riau telah dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Maret 2019 di Hotel Grand Zury Pekanbaru dengan tema *" Penguatan Posisi dan Peran FMS Dalam Pemenuhan dan Perlindungan HKSR Perempuan Untuk Mencapai Tujuan SDG's"*. Pertemuan ini dihadiri oleh para pengurus FMS Kota Pekanbaru , kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir yang membahas review rencana kerja masing-masing FMS, penguatan FMS dengan memetakan insitusi yang berpengaruh bagi FMS, dan menyusun rencana kerja FMS tahun 2019. Jumlah peserta Pertemuan FMS ini adalah 21 orang terdiri dari 17 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.



Pertemuan FMS Riau

Berdasarkan hasil pemetaan institusi yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja FMS adalah pemerintah daerah mulai dari level Pemerintahan Desa sampai kabupaten/ Kota dan Propinsi. Oleh karena itu untuk mempererat kerjasama FMS dengan pemerintah daerah maka perlu dilakukan kegiatan audiensi dengan para kepala pemerintahan tersebut. Tindak lanjutnya adalah membuat rencana kerja untuk melakukan audiensi kepada Kepala desa atau kepala Kepenghuluan, Bupati dan Walikota serta Gubernur. Selain dengan Kepala pemerintahan, FMS juga merasa perlu melakukan audiensi dengan OPD atau Dinas-dinas pemerintah yang terkait langsung dengan program Kesehatan dan Gizi seperti Kepala Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota dan Propinsi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) tingkat kabupaten, kota dan propinsi serta Kepala Puskesmas sebagai lembaga layanan kesehatan tingkat primer.

Sejak bulan Januari sampai Juni 2019, sudah ada beberapa rencana kerja yang dilaksanakan , yaitu 1) Audiensi ke Kepala Desa Koto Tibun Kabupaten Kampar , 2) Dinkes Kota Pekanbaru, 3) Puskesmas Kampar kabupaten Kampar, 4) Puskemas Rumbio Jaya, kabupaten Kampar, 5) Puskesmas Bagansiapiapi Kabpaten Rokan Hilir dan 6) Kepala Kepenghuluan (Desa) Sungai Sialang Hulu Kabupaten Rokan Hilir. Audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan FMS, PPSW Sumatra dan memberikan usulan kerjasama antara FMS, PPSW Sumatra dengan Instansi terkait program HKSR. Audiensi ini dihadiri oleh 61 orang terdiri dari 47 orang peremapuan dan 14 orang laki-laki.**(Penulis: Endang Sulfiana/PPSW Riau).**

FMS Sumatera Barat

Forum Multi-Stakeholders (FMS) di 3 kab./kota (Padang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar) melaksanakan pertemuan pada semester ini. Pertemuan FMS Kab. Padang Pariaman terlaksana pada 14 Februari 2019. Kegiatan ini melibatkan 47 orang peserta (28P dan 19L) yang terdiri dari Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinsos PPPA, UPT KB, UPT Pendidikan, DPMD, Puskesmas, KUA, pemerintah kecamatan, wali nagari, tokoh adat, tokoh agama, CO, dan tim LP2M. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan untuk mewujudkan Kecamatan Enam Lingkung menjadi Kecamatan Sehat. Indikator "Kecamatan Sehat" yang disepakati pada pertemuan ini antara lain, Jumlah pernikahan di usia anak menurun, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun, *Open Defecation Free* (ODF), Angka Kematian Ibu dan Bayi menurun, angka *stunting* menurun, dan mencapai *Universal Health Coverage* (UHC).



Proses Diskusi FMS Terkait Pusat Layanan dan Pembelajaran HKSR-Gizi

Strategi yang disepakati untuk dikembangkan sebagai upaya mewujudkan Kecamatan Sehat ini adalah **Pembentukan Pusat Layanan dan Pembelajaran HKSR-Gizi di Puskesmas Enam Lingkung** dan Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk penanggulangan stunting. Saat ini, angka stunting di Kab. Padang Pariaman masih 19%, khususnya di Kec. Enam Lingkung masih >20%. Oleh karena itu, FMS bersepakat untuk menjadikan Kecamatan Enam Lingkung sebagai pilot untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman Sehat.

Forum Multi-Stakeholders Kab. Tanah Datar melakukan diskusi untuk mendorong percepatan pencapaian SPM kesehatan pada 28 Juni 2019 di Aula Kantor Camat Lintau Buo Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 orang (24P dan 8 L) yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, camat, Puskesmas, wali nagari, CO/kader local perempuan, dan tim LP2M. Pada kegiatan ini, hasil pemetaan SPM Puskesmas disampaikan dan dibahas bersama. Hasil pemetaan dijadikan sebagai dasar bagi para pihak untuk menentukan upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian SPM. Beberapa upaya bersama yang disepakati antara lain mengembangkan posyandu remaja, mengeluarkan instruksi camat untuk menerapkan pola hidup sehat (membuat jamban sehat dan memanfaatkan lahan pekarangan untuk sumber gizi keluarga), serta mendorong adanya alokasi dana nagari untuk kegiatan HKSR-Gizi.

Pertemuan FMS Kota Padang terlaksana pada 4 April 2019 di Hotel Basko Padang. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama LP2M dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dengan tema "Pemilu Bersih untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan - Demokrasi OKE, Golput NO WAY". Tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan pentingnya menggunakan hak pilih untuk menentukan calon pemimpin yang peduli dengan kepentingan perempuan. Kegiatan FMS ini melibatkan 46 orang peserta (44P dan 2L) yang terdiri dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) perempuan, akademisi, media, LSM, ormas, anggota KPI, FKPAR 3 kab./kota, dan tim LP2M. Pada kegiatan ini, empat orang Caleg perempuan tingkat nasional, provinsi, dan kota dari lintas partai juga hadir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya. Keempat Caleg perempuan ini adalah Rita Murni (Caleg DPDR RI), Afrida (Caleg DPRD Provinsi), Yasnida Samsudin (Caleg DPRD Provinsi), dan Mursida (Caleg DPRD Kota Padang). Harapannya perempuan akan pilih perempuan. Kegiatan ini diakhiri dengan deklarasi bersama untuk tidak Golput pada Pemilu Serentak 2019.

FMS Jambi

Peran FMS Provinsi Jambi selama ini ikut berperan aktif dalam kegiatan loby maupun audiensi kepada dinas terkait bersama APM dan FKPAR untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Saat ini FMS Kabupaten Merangin sedang mengadvokasi adanaya Peraturan Bupati/ Surat Edaran tentang pencegahan perkawinan diusia anak. lintas sektor terdiri dari:

Kemenag, DSP3A, APM, DPP&KB, Dinkes, Diknas, UPPA, DPKAD. Sebagai penanggungjawab adalah DSP3A Kabupaten Merangin. Untuk di tingkat kecamatan, Forum lintas sektor terbentuk di 3 kecamatan yaitu kecamatan Pamenang Barat, Renah Pamenang dan Pamenang selatan. Forum ini mengadakan pertemuan pertriwulan dengan melakukan pembahasan issu kesehatan yang dialami di masing – masing kecamatan. Forum berasal dari unsur Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Puskesmas, APM, KUAKEC, Posyandu, PKK, PLKB, Polsek, dan UPTD diknas.



Pertemuan FMS Kabupaten Merangin

FMS Bengkulu

Pertemuan Forum Multi Stakeholders (FMS) Kabupaten Seluma yang dilaksanakan pada 19 Juni 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Seluma. Pertemuan dihadiri oleh 15 orang anggota FMS terdiri dari 9 orang Laki-laki dan 6 orang perempuan. Pertemuan kali ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan perubahan SPM Bid. Kesehatan yang baru, yakni PMK No. 4 tahun 2019. Keberadaan SPM tersebut menjadi penting dikomunikasikan pada anggota FMS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, bahwa untuk pencapian target SPM Bidang Kesehatan dibutuhkan sinergitas Lintas Sekstor/Program dan Stakeholders lainnya dan pelibatan aktif kelompok-kelompok masyarakat (terutama kelompok perempuan). Acara pertemuan FMS dihadiri dan dibuka oleh Asisten III Pemda Kabupaten Seluma yaitu Bpk. Marhadinata. Sekaligus terlibat bersama Cahaya Perempuan WCC dalam proses fasilitasi pertemuan. Kegiatan.

Pertemuan ini membahas tantangan dan dukungan dari anggota FMS untuk pencapaian target SPM Bidang Kesehatan terutama poin 1 – 7, penekanannya pada peningkatan layanan kesehatan pada warga di perdesaan terutama perempuan miskin. Maka, anggota FMS dan pihak-pihak berkepentingan lain menyepakati beberapa hal antara lain : (1) Perbaikan data dan system data kesehatan, pengalaman selama banyak kasus perempuan miskin yang mengalami masalah persalinan, Kanker Rahim dan Balita Gizi Buruk belum memiliki administrasi kependudukan sehingga terkendala dalam kepemilikan kartu BPJS Kesehatan (KIS) dan atau katu Jamkesda. (2) Kegiatan FMS terkait masalah kesehatan (HKSR) dan Gizi juga mesti terntegrasi dengan kegiatan Tim Penanganan Kemiskinan Kabupaten Seluma. (3) Penggalangan dana public untuk pengobatan perempuan miskin terutama masalah HKSR dan Gizi Buruk pada Balita menjadi pembelajaran dalam memoblisasi komunitas untuk tetap saling peduli.

Pertemuan FMS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan pada 21 Juni 2019, dihadiri 12 orang anggota terdiri dari 7 perempuan dan 5 orang laki-laki. Bertempat di Aula Dinas Kesehatan denga agenda sosialisasi PMK No. 4 tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan dan pembahasan rencana tindaklanjut dari diterbitkan Peraturan Bupati Rejang Lebong No. No. 12 Tahun 2019 tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuh Kembang Anak, Penanggulangan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat. Pertemuan FMS difasilitasi oleh Ibu Henny Kurniaty selaku Staf Ahli Bupati Bidang Sosial-Ekonomi. Statistik Bidang Kesehatan selama dua tahun terakhir (Sumber: Dinas Kesehatan Rejang Lebong) menjadi pijakan untuk melihat tahap pencapian target SPM Bidang Kesehatan yang baru. Persoalan AKI yang mencapai 8 kasus, AKB 17 kasus, Gizi Buruk 6 kasus, stunting yang masih berada pada angka 13%, dan BBLR 212 kasus.



Pertemuan FMS Kota Bengkulu

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal penting sebagai tindaklanjut implementasi Perbup. No. No. 12 Tahun 2019 tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuh Kembang Anak, Penanggulangan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan (HKSR) dan Gizi yakni ; (1) Pembenahasan Sistem Data Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Saat ini, Dinas Kesehatan Rejang Lebong dan Universitas Bengkulu dalam proses penyelesaian system data kesehatan. Ke depan data kesehatan bisa diakses oleh siapa pun dan proses sinkronisasi data dengan pihak Dinsos, Bappeda, Dinas Pendidikan, Kemenag akan lebih mudah dan cepat. (2) Sosialisasi Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuh Kembang Anak, Penanggulangan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat yang disusun bersama anggota FMS dan diselaraskan oleh Bidang Hukum Pemda Rejang Lebong. Dan menjadi payung hukum untuk penyusunan RAD Stunting (agenda Dinas Provinsi Bengkulu) dan sekaligus penguat anggaran dan program di Bidang Kesmas & Gizi Dinkes Rejang Lebong. (3) Pendekatan baru mengatasi persoalan tsb melalui Kesehatan Pendekatan Keluarga (KPK) dengan harapan bisa meningkatkan keterlibatan para pihak dalam memperbaiki tingkat pengetahuan dan pelayanan kesehatan (HKSR) dan Gizi di Kabupaten Rejang Lebong.**(Penulis:Tety Sumeri/CP WCC)**

FMS Palembang

Forum Multi Stakeholder (FMS) Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan dan Anak di Kab. Muara Enim, Kabupaten OKI maupun Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan pada periode ini masih aktif melakukan diskusi regular. Salah satu topik yang didiskusikan secara kritis dan mendalam adalah mengenai Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) harus segera disahkan. Selain alasan pentingnya RUU P-KS disahkan, juga didiskusikan beberapa isu penting dalam RUU P-KS termasuk mendiskusikan beberapa pasal yang menjadi pro dan kontra dimasyarakat. FMS Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muaraenim dan FMS Kota Palembang juga membahas konsep dan mekanisme penyelenggaraan layanan terpadu HKSR dan pembelajaran bagi perempuan & perempuan muda (OSSL), dimana Puskesmas Gelumbang di Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim dan Puskesmas Sekip di Kec. Kemuning Kota Palembang akan menjadi Puskesmas "piloting" untuk penyelenggaraan OSS&L ini.

Selain mendiskusikan mengenai RUU P-KS dan OSS&L, topik mengenai penghapusan perkawinan anak juga sangat seru di bahas di pertemuan FMS Kota Palembang. Semua sepakat bahwa perkawinan anak harus diakhiri karena berdampak pada kemiskinan, kematian ibu dan bayi, ataupun bayi lahir dengan Berat Badan Rendah (BBR). Di samping itu perkawinan anak membuat kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga rentan terjadi sekaligus merenggut hak anak, misalnya hak pendidikan dan hak mendapatkan perlindungan dan kesehatan. Semua lembaga/institusi anggota FMS berbagi pengalaman dan informasi kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dalam upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dan menyusun strategi advokasi bersama dalam upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di Kota Palembang, yang juga diharapkan mendukung rencana Pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan Kota Layak Anak.



Diskusi Reguler FMS Advokasi HKSR Kota Palembang

FMS Lampung

Pertemuan regular FMS Kab. Tanggamus pada periode ini bertujuan untuk memperkuat komitmen Dinas Kesehatan Tanggamus dan Puskesmas Gisting dalam Pengembangan Pusat Layanan Kesehatan Seksual Reproduksi. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanggamus, Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, P2TP2A Kabupaten Tanggamus, Polres Kabupaten Tanggamus, FAKTA Tanggamus, TP PKK Kabupaten Tanggamus, Puskesmas Kecamatan Gisting, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Polsek kecamatan Talang Padang, dan Satgas Pekon Purwodadi.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Bapak Sukisno S.K.M., M. Kes., menyampaikan pengembangan pusat layanan KSR perempuan sangat sesuai dengan program yang ada di Dinas Kesehatan, salah satunya mengarah pada penurunan angka stunting (yang juga sesuai Instruksi Presiden), melalui edukasi kesehatan seksual dan reproduksi. Stunting bukan hanya kondisi anak yang pertumbuhannya terlambat, tetapi dilihat juga dari reproduksinya karena derajat kesehatan makro yang diukur adalah AKI dan AKB dan berkaitan dengan reproduksi. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sudah melakukan beberapa langkah untuk menurunkan AKI dan AKB dan menjadi salah satu program prioritas Bupat. Kepedulian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR sangat supporting melengkapi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan reproduksi. Bapak Sukisno juga merefleksikan apa yang sudah dikerjakan di puskesmas untuk pencapaian kesehatan reproduksi masih terbatas, meski sudah berkolaborasi dan didukung oleh semua pihak.

Ke depan Pengembangan Pusat Layanan HKSR juga akan di tindak lanjuti ke tingkat kecamatan, dan akan dilakukan monev secara berkala untuk melihat permasalahan apa yang muncul dan progressnya seperti apa sehingga perbaikan akan dilakukan bersama. Inisiasi ini menjadi pioneer di Kabupaten Tanggamus dan akan dicontoh pihak lain. Pemerintah Kabupaten Tanggamus merasa sangat diuntungkan dengan kinerja lintas sector sehingga kesehatan masyarakat tercapai. **(Penulis:Sofyan/Damar Lampung)**



Pertemuan FMS Kab. Tanggamus Membahas Pengembangan Pusat Layanan HKSR

Cerita Perubahan



" Menabung Di CU Sangat Memudahkan Bagi Perempuan Di Pedesaan"

Ditulis oleh : Khuzaima, Staf Lapang Flower Aceh.



Pada tahun 2009, Flower Aceh masuk ke desa kami, Desa Tumpok Berandang Kec.Muarabatu. Pertemuannya di Meunasah, dan pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang program-program Flower Aceh tentang kesehatan reproduksi, CU atau simpan pinjam; dan juga tentang cara-cara mengolah obat-obat tradisional, seperti temulawak, minyak urut. Tentang CU kami harus bergabung di kelompok, menabung dengan kesepakatan bersama, asal jasa tidak terlalu tinggi; karena kami perempuan tidak punya uang banyak. Saya tertarik tapi belum bergabung, karena pada saat itu saya baru lulus SMA dan belum ada pekerjaan dan belum ada uang. Saya bergabung menjadi anggota pada tahun 2015, ketika sudah menjadi guru honor di PAUD. Saya diajak oleh CO Ka Nilawati supaya gaji honor saya tersimpan tidak habis semua. Setiap bulan ada saya menabung di CU.

Perubahan yang saya rasakan, saya mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan, yang sebelumnya kami tidak faham harus menjaga kebersihan. Ketika pulang dari sawah perempuan-perempuan tidak membersihkan badannya yang seharian basah oleh air sawah yang mengandung pupuk, tapi langsung masak untuk anak-anak dan suaminya. Yang biasanya setelah kerjaan selesai baru mandi dan bersih-bersih, yang tentu sering gatal-gatal di bagian vagina.

Setelah kami dapat informasi tentang kespro, keluarga kami dan anggota kelompok mulai sadar akan kesehatan reproduksi dan selalu menjaga kesehatan. Juga sering berkonsultasi ketika ada Posyandu tentang kesehatan reproduksi.

Sebelumnya saya tidak faham manfaat simpan pinjam di CU. Setiap dapat honor habis untuk keluarga dan jajan anak-anak, dan belum setengah bulan sudah pinjam sama teman untuk biaya-biaya rumah tangga dan anak-anak. Setiap bulan tidak ada yang tersisa; gali lobang tutup lobang untuk bayar hutang. Pendapatan suami sebagai tukang bangunan tentu tidak cukup untuk biaya hidup kami, belum lagi biaya anak sekolah. Hal yang paling penting bagi saya, saya sudah mempercayai orang yang memegang uang dan saya tidak khawatir lagi untuk menabung.

Saya selalu hadir setiap pertemuan kelompok dan kami selalu membicarakan dana CU yang sudah meningkat, dan diumumkan jumlah tabungan masing-masing anggota yang sudah banyak. Ada yang mengambil pinjaman, dimana mereka hanya membayar jasa pinjaman sebesar Rp. 10.000 kalau meminjam Rp. 100.000, dan kalau kita sudah menabung lebih dari 6 bulan. Tabungan sukarela kita adalah modal kita, dan saya tertarik betul. Saya bergabung sejak tahun 2015 hingga saat ini saya menabung di CU dengan rutin, dan saya sudah yakin karena pemegang uang adalah orang yang dipercaya oleh kelompok, orang yang kita kenal, dan saya tidak merasa khawatir lagi bahwa uang saya tidak akan hilang.

Saya telah sadar bahwa menabung di CU sangat bermafaat bagi saya dan keluarga saya, yang sebelumnya honor saya tidak tersisa, ternyata sekarang saya punya tabungan yang sangat mudah saya mengambilnya, tanpa harus ke bank. Yang tadinya belum tentu saya bisa menabung karena gaji sangat kecil namun saya sekarang punya tabungan walau dalam sebulan Rp. 10.000, dan tabungan sukarela yang bisa saya gunakan kapan-kapan saya perlu untuk keluarga saya dan biaya sekolah anak-anak saya.

Manfaat yang saya dapatkan dari tabungan CU saya sudah mempunyai modal untuk pertanian bawang merah dan sayur-sayuran lainnya seluas 4.000 meter dengan membentuk kelompok keluarga (4 keluarga). Bibit bawang dan pupuk organik kami peroleh dari Dinas Pertanian, dan untuk biaya semai serta biaya penyanggah hama kami harus punya modal masing-masing di mana dana CU bisa saya manfaatkan. Setelah panen dalam jangka waktu 4 bulan saya kembalikan dengan bunga pinjaman dan sudah berjalan selama 2 tahun. Saya sangat bangga ada tabungan CU yang bunga pinjaman tidak besar dan manfaatnya sangat luar biasa.

" Aku Tetap Berharga, Meski Nasi Sudah Menjadi Bubur"

Ditulis oleh : Sarma Sigalingging, Staf Lapang PESADA



Peribahasa " Nasi sudah jadi bubur " bagiku bermakna di mana nasi yang sudah jadi bubur masih bisa berguna bagi kesehatan tubuh. Bubur bisa diolah dengan berbagai rasa sehingga menciptakan makanan baru. Bisa jadi bubur ayam, bisa jadi 'pelleng' (makanan khas Pakpak) yang bisa memberikan nilai tambah. Peribahasa ini yang memotivasi saya untuk tetap maju dan tidak menyerah.

Di 15 tahun yang lalu, masa suram dan masa putus asa dalam hidupku datang. Saya yang bernama Leri Sinaga (38th) memiliki 2 orang anak, anak perempuan (10th) dan laki-laki(14th) usia mereka saat ini. Masa depanku hilang dan harapan hidupku hilang ketika rumah tangga yang sudah saya bina dan bangun dilanda masalah. Suami saya (SM) meninggalkan kami pergi tanpa alasan dan sampai saat ini tidak kami ketahui di mana. Suami saya pergi meninggalkan kami ketika anak saya pertama laki-laki berusia 2 tahun dan anak perempuan 3 bulan. Suami saya tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi bagi saya tiap hari . Saya tidak tahu jalan apa yang harus saya tempuh dan saya tidak bisa mencukupi kebutuhan kedua anak saya. Tanpa pikir panjang saya kembali kepada orang tua saya dan membawa kedua anak saya. Saya mengharapkan bantuan kedua orang tua saya untuk membantu saya dalam perawatan dan membesarkan anak saya. Anak perempuan saya penyandang disabilitas "intelektual" yang sampai saat ini dalam perawatan rutin yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini membuat biaya rumah tangga saya menjadi besar dan saya harus bekerja menjadi buruh tani harian untuk menutupinya.

Saya merasa disingkirkan dari pihak manapun. Saya tidak pernah dilibatkan di acara pesta adat dan beribadah, dan pengurusan identitas kartu keluarga saya juga sangat sulit untuk saya dapatkan. Tetapi saya tidak menyerah kepada keadaan ini dan secara tidak sengaja saya mengikuti pertemuan yang ada di desa kami oleh Pesada. Delapan tahun sudah saya bergabung dengan organisasi perempuan dampingan Pesada yaitu CU Pesada Perempuan.

Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya mulai menabung kecil-kecilan. Saya hadir dalam diskusi-diskusi dan pelatihan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh PESADA dan CU. Banyak manfaat yang saya terima dari program tersebut. Saya merasa ada organisasi yang memperhatikan kepentingan saya sebagai orang yang sering dipinggirkan. Hingga saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai pengurus unit untuk program penguatan ekonomi di Desa Kaban Julu dengan nama unit Bahagia. Jumlah anggota kami saat ini 70 orang. Saya juga dipercaya sebagai pengurus SPUK (Suara Perempuan Untuk Keadilan) untuk wilayah Dairi. Juga menjadi pengurus Kebun Keluarga, bagian dari program pertanian organic untuk kesehatan

pangan. Saya juga aktif di kegiatan desa, di mana Dinas Kesehatan memberikan kepercayaan kepada saya sebagai kader Posyandu, dan saat ini saya selalu dillibatkan oleh pemerintah desa untuk mengikuti rapat-rapat. Saya juga terpilih sebagai KPPS dan panitia Pemilu lainnya. Saya juga mendukung untuk terlaksananya kelompok remaja di desa Kaban Julu mengingat kondisi saat ini bahwa anak saya sudah remaja. Saya ingin anak-anak di desa saya tidak menjadi korban pernikahan dini/anak.

Saya sangat berterimakasih ketika desa saya menjadi lokasi untuk program HKSR dampingan PESADA. Terimakasih untuk PESADA dan CU yang sudah datang dalam kehidupan saya sehingga merubah kehidupan saya. Sekarang saya lebih diakui, dihargai, dihormati dan terpandang di desa. Semoga kehidupan saya lebih cerah lagi ke depannya, bersama PESADA dan CU . Saya yakin itu pasti bisa. Terimakasih program HKSR . (Sarma)

"Menjemput Harapan"

Ditulis oleh : Tika Widya, Staf Lapang PPSW Sumatra



Nama Saya Umi Salma lahir 40 tahun silam di Dusun Pasubilah, Desa Teratak, Kampar. Saya tinggal di Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Aktifitas saya sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga dan ikut membantu suami sebagai pedagang dan bertani. Selama 1 tahun terakhir saya sudah mulai menambah penghasilan dengan membuka Sanggar kecantikan (Wedding Organizer) yang saya kerjakan dengan anak-anak saya. Saat Ini saya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa Pulau Payung. Saya termotivasi untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin dan ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Semua ini saya lakukan karena ingin mengangkat derajat kaum perempuan, membuat perempuan lebih berdaya, dan memperjuangkan Pemenuhan Hak-hak Perempuan. Itu cita-cita saya sekarang.

Dulu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang beraktifitas membantu suami berjualan dan bertani. Saya putus sekolah pada saat duduk di bangku SMP di sebuah Pasantren di Kampar dan akhirnya pendidikan terakhir saya hanya lulus SD. Ketika tidak bisa melanjutkan sekolah, singkat cerita saya menikah di Usia 14 tahun. Saya memiliki 2 orang anak perempuan dan anak pertama saya mengalami disabilitas (Tuna rungu dan tuna wicara). Setiap hari aktifitas saya hanya membantu suami, bertani dan mengasuh anak, dan saya juga sekali-kali mengikuti kegiatan di luar rumah seperti PKK; dan ikut bergabung di kegiatan desa seperti wirid dan olahraga volly bersama teman-teman di desa.

Pada tahun 2016 saya mendengar dari desa lain ada sebuah lembaga yang mendampingi kelompok perempuan dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Awalnya saya tidak tertarik untuk membentuk kelompok karena banyak sekali lembaga keuangan yang datang ke desa menawarkan kita untuk membentuk kelompok simpan panjam. Saya lihat banyak sekali aktifitas kelompok tersebut, saya tertarik untuk membentuk kelompok seperti mereka di Desa saya, dan akhirnya pada tawal tahun 2017 saya berhasil membentuk kelompok simpan pinjam dampingan lembaga PPSW Sumatra yang di beri Nama Khairunnisa yang di ketuai oleh saya sendiri.

Setelah hampir 2 tahun mengikuti pelatihan dari PPSW Sumatra saya sadar bahwa perempuan sangat berperan dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan baik di keluarga, masyarakat, politik, pemerintah dan yang paling penting perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Dulu saya

hanya tamat SD dan dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Pelan-pelan saya membuka pikiran saya dan tidak ingin anak-anak saya seperti saya yang hanya tamat SD. Mereka harus memiliki pendidikan yang baik. Saya juga menyampaikan kepada kedua putri saya kita sebagai perempuan harus mandiri memiliki pendidikan dan ekonomi yang baik khususnya kepada anak saya yang memiliki keterbatasan. Mulai dari situ saya mulai melibatkan anak saya di usaha *wedding organizer* yang kami bangun bersama- sama sampai saat ini.

Saat ini saya sudah memegang ijazah Program Paket C. Saya sadar betul ketika kita mau menjemput harapan saat itu juga pikiran kita akan terbuka dan kita akan memiliki kesadaran untuk merubah apa yang ada di dalam diri kita. Pendidikan dan ekonomi perempuan merupakan modal penting untuk perempuan bisa menjadi pemimpin. Bagaimana perempuan bisa percaya diri, adalah ketika perempuan bisa mandiri secara ekonomi dan berilmu. Saya akan belajar terus untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai bekal untuk menjadi calon Kepala Desa.

" Afrida si Pembelajar Otodidak, dari Peternak Unggas Masuk Ke Arena Politik"

Ditulis oleh: Refita, Staf Lapang LP2M



Banyak hal yang bisa dilakukan seorang perempuan untuk memotivasi diri, agar punya pengetahuan yang tak bisa didapatnya di bangku perguruan tinggi atau setingkatnya. Ilmu itu kemudian ditularkan kepada orang sekitar hingga memberi hal positif bagi mereka yang membutuhkan. Nama Afrida, mungkin tak begitu akrab di telinga sebagian besar masyarakat Kota Padang khususnya dan Sumbar secara umum. Namun, bagi mereka yang pernah terlibat atau bergabung di sejumlah organisasi perempuan seperti LP2M Sumbar, Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Sumbar dan jaringan perempuan usaha kecil (Jarpuk); sosok Afrida, pastinya sudah sangat mereka kenal dengan baik.

Ibu lima anak ini, dikenal sebagai perempuan yang punya kemampuan dalam mengembangkan ternak. Seperti sapi, kambing, ayam dan itik. Tak hanya mampu mengembangkan ternak, tapi dia juga punya kemampuan dalam mengolah pakan ternak hingga mengobati penyakit ternak dengan pengobatan alternatif. Misal, ketika ayam berak kapur, maka obat yang bisa diberikan pada ayam adalah pinang muda yang ditumbuk. Satu biji pinang muda tersebut bisa untuk tiga ekor ayam. Kemudian ketika ayam flu atau "dek akuak" istilah di Minang, bisa diobati dengan cabe rawit yang digiling kemudian dicampurkan pada pakan makanan ayam.

Ilmu yang dimiliki Afrida, dalam mengembangkan ternak, mengobati dan mengolah pakannya didapat bukanlah karena dia lulusan peternakan sebuah perguruan tinggi atau sederajat, tapi hanya berbekal ilmu dari berbagai buku dan pelatihan yang pernah dia ikuti. Ilmu itu dimanfaatkannya untuk diri sendiri kemudian dia bagi ke para perempuan dan masyarakat yang mau mendapat ilmu darinya. "Saya bukan lulusan perguruan tinggi dengan jurusan kesehatan atau pun peternakan. Saya hanya perempuan yang suka belajar dengan membaca buku-buku dan mengikuti pelatihan," katanya usai melakukan persiapan sebuah agenda di kantor sekretariat LP2M Sumbar di sekitar kawasan SMAN 3 Padang. Beternak adalah hobinya. Salah satunya beternak ayam kampung menjadi ayam baterai dengan jumlah hingga ratusan ayam.

Beternak ayam dilakukan Afrida, salah satunya adalah untuk menopang ekonomi keluarga, mengingat suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Berbekal dari buku-buku yang dia baca dan pelatihan yang

diikutinya, Afrida bisa mempelajari, pemeliharaan ayam, pemilihan bibit sampai menetaskan telur dengan mesin ayam tetas dengan teknologi tepat guna. Hingga dia berhasil memiliki 400 ekor ayam. Ayam kampung dijadikannya ayam baterai. Kemudian pengembangan ayam kampung dengan sistim koloni. Kemampuannya itu lalu ditularkan kepada para perempuan yang fokus bidang ternak, khususnya ayam di bawah dampingan LP2M Sumbar dan para tetangganya. Hingga mereka berdaya dan penghasilannya bisa menambah kekurangan ekonomi dalam keluarga.

Dalam berjalannya waktu Afrida terus belajar secara otodidak, namun untuk memperkuat ilmu yang dia baca, dia pun bergabung kedalam sebuah organisasi suka rela kesehatan hewan (Sukakeswan) yang di bentuk sebuah organisasi asing yang dulunya pernah berkantor di Bukittinggi beberapa tahun lalu. Setiap kali ilmu yang dia miliki dan berguna bagi orang, pastinya ada kepuasan batin yang tak ternilai dengan materi. Misal, suatu hari datang seorang peternak yang mengeluhkan sapinya kesulitan melahirkan. Berbekal ilmu yang pernah dipelajarinya, dia pun membantu peternak itu. Di lokasi dia berkomunikasi melalui bahasa isyarat dengan sapi tersebut. Sambil mengelus kepala sapi yang meringkih kesakitan dan memeriksa sapi dengan sebuah alat yang didapatnya ketika pelatihan. Lalu dia meminta pemilik sapi untuk menyiapkan jeruk, madu, telur ayam. Semua itu dicampur untuk diminumkan pada sapi. Berkisar sekitar 5 hingga 10 menit sapi itu mengejan, tapi kepala bayi sapi keluar masuk. Dia pun meminta kertas untuk membungkus tangannya dan sabun untuk mengoleskan ke kelamin sapi sambil menyibakkan tempat lahir bayi sapi. Alhasil, bayi sapi keluar dengan selamat. Begitu pun induknya kembali bertenaga setelah meminum ramuan yang dia buat.

“Ketika menolong orang ada kepuasan tersendiri dalam diri saya. Karena hanya dengan ilmu yang saya punya saya dapat membantu mereka yang membutuhkan,” kata istri dari Sumardi ini. Sebanyak dia berbuat baik untuk orang sekitar, tentu ada pula yang tidak senang yang apa yang dia lakukan. Ada cemooh, yang pernah membuat Afrida menangis. Orang itu bukan lah orang lain, tapi masih ada hubungan keluarga dengannya. Bahkan dia pernah diadu domba dengan suaminya, beruntung sang suami tidak terpengaruh oleh hasutan orang tersebut. Sebab dia sudah berpesan kalau keluar rumah untuk mencari ilmu, bahkan bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga. “Mereka berkata, saya sudah belajar ke sana kemari tapi hidup saya tidak juga berubah jadi kaya. Padahal saya berorganisasi bukan untuk cari kaya tapi cari ilmu dan untuk menyambung hidup. Saya ingin anak-anak saya kuliah, tidak seperti saya,” katanya panjang lebar.

Sejak gadis Afrida sudah terbiasa berkegiatan di berbagai organisasi. Banyaknya organisasi yang diikuti anak ke empat sebelas saudara itu, tak membuat dia harus meninggalkan kewajibannya dalam mengurus anak dan rumah tangga. Meski demikian, bila jadwalnya terlalu padat tugasnya sebagai ibu rumah tangga diambil alih oleh sang suami, yang bisa memasak untuk anak-anaknya. Agar waktunya terarah, anak pasangan Anas (almarhum) dan Rosna ini, membuat jadwal rutinitasnya dalam sebuah buku. Kemudian jadwal yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Jika satu agenda batal karena sebuah alasan, maka agenda lainnya menanti untuk diisi oleh perempuan kelahiran 4 Februari 1968 ini. Meski ada yang tak suka dengan kegiatan yang dijalani Afrida, banyak pula kaum bapak-bapak di sekitarnya menyuruh para istri mereka untuk belajar dengannya.

Selain mahir di bidang ternak, Afrida, sebelumnya juga salah seorang perintis koperasi Gunuang Sariak Saiyo, yang anggotanya kini mencapai puluhan orang. Total aset hingga ratusan juta rupiah dan dana yang telah bergulir mencapai miliran rupiah. Kemudian dia juga aktif dalam organisasi pendampingan kesehatan khusus KB, fasilitator pemilih cerdas pada pemilu 2014, pendamping bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, pengurus PKK Pokja IV, koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, pengurus Bundo Kanduang di Kecamatan Kuranji dan sejumlah organisasi lainnya. Selain itu dia juga terlibat dalam pendirian sejumlah organisasi sosial, seperti saya dirikan lembaga CIKAL, sebuah lembaga pendidikan non formal bagi mereka yang putus sekolah. Pelatihan itu diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat sekitar. Sayang, lembaga itu hanya bertahan selama satu tahun, karena keterbatasan dana. Satu mimpi Afrida yang belum sempat terwujud secara maksimal, mendirikan lembaga yang

mengurus Lansia. Itu karena keterbatasan dana dan kesalahan masyarakat sekitar dalam memahami pendirian lembaga yang ingin dia wujudkan.

Berbekal hobi berorganisasi dan pengalaman diberbagai organisasi saat ini Afrida diminta PDI Perjuangan untuk menjadi caleg perempuan. Permintaan itu kemudian diamininya setelah meminta izin dari keluarga besar, mulai dari suami, anak-anak hingga para mamak dan lainnya. Mereka mendukung Afrida menjadi calon legislatif untuk Provinsi Sumbar, Dapil 1 khusus Kota Padang dengan nomor urut 2. Majunya Afrida ke kancah perpolitikan di Ranah Minang tak lain untuk membawa aspirasi bagi kaumnya. Mengingat banyak sekali ketimpang yang dia lihat selama terjun ke lapangan. Jika selama ini dia sudah berbuat dengan berbagi ilmu untuk orang sekitar dengan terjun langsung ke masyarakat, kini tak ada salahnya Afrida mencoba peruntungan di legislatif. Sehingga apa yang dia cita-cita selama ini bersama sejumlah organisasi perempuan tersebut bisa terwujud sesuai harapan.

"Kalah menang dalam sebuah kompetisi itu hal yang biasa. Sekarang ini saya diberi kepercayaan oleh sebuah partai, kini saya coba untuk menjalaninya. Jika memang ada jalan saya akan mencoba. Jika tidak, saya tentu akan meneruskan aktivitas saja di sejumlah organisasi tempat saya dibesarkan," sebut perempuan dengan motto hidup, "Hidup harus berguna bagi orang lain, selagi mampu melakukannya". Keluarga besar, terutama suami dan anak-anaknya sangat mendukung dan memberi kepercayaan, semua untuk mewujudkan mimpi yang sempat tertunda.

Masuk ke dunia politik dan ikut dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di DPRD memang tidaklah semudah membangun kekuatan di tengah komunitas. Paling tidak hal itu yang dirasakan Afrida setelah perjuangannya dalam Pemilu Serentak 2019 belum berhasil mengantarnya ke kursi wakil rakyat. Banyak masyarakat masih belum berpolitik secara profesional dengan lebih memperhatikan kualitas, kapasitas, dan rekam jejak seseorang. Masih banyak masyarakat yang mementingkan popularitas, cara kampanye yang mewah, bahkan politik uang jelang pencoblosan. Meski begitu, Afrida tetap bangga karena Ia telah berhasil mengalahkan rasa takut pada dirinya sehingga berani mencoba jalur politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Di sisi lain, Afrida juga mampu menepis stigma bahwa bukan hanya orang terkenal dan punya banyak uang saja yang bisa mencaleg.(*)

Tiga Dalam Satu

Ditulis oleh: Sutiyem, Staf APM Jambi



Nama saya Eni Romiah, lahir di Temanggung pada tanggal 10 Desember 1974 yang lalu. Saya berdomisili di Dusun Mampun Rejo desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin - Jambi. Sejak tiga tahun yang lalu saya dipilih kawan – kawan anggota sebagai Ketua CC. Lentera Hati, salah satu kelompok dampingan Aliansi Perempuan Merangin. Saya sering terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang diadakan Aliansi Perempuan Merangin. Dalam program HKSR ini, baik yang melalui diskusi reguler, seminar, pelatihan maupun perayaan dan kampanye hak – hak perempuan

Selama mengikuti kegiatan kelompok maupun APM, banyak perubahan – perubahan yang saya alami. Perubahan itu ada yang terjadi dalam diri, keluarga saya maupun masyarakat dan di pemerintahan desa. Perubahan – perubahan tersebut di antaranya :

1. Pola pikir saya lebih luas, tidak terburu- buru dalam memutuskan suatu masalah
2. Memiliki bekal pengetahuan dalam mendidik anak usia dini dan anak remaja saya, terutama tentang kesehatan reproduksi dan membangun komunikasi yang baik.
3. Dapat memotifasi dan mendampingi kelompok remaja perempuan di desa

4. Mampu berperan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti panitia Pemilu, kader posyandu, Kader KB, dll
5. Muncul kesadaran untuk melakukan deteksi dini kanker rahim dan payudara
6. Keluarga dan Lingkungan masyarakat memandang positif jika saya berkegiatan di APM
7. Pemerintah desa melibatkan saya dalam rapat – rapat pengambilan keputusan di tingkat desa maupun dusun

Perubahan – perubahan yang luar biasa diatas tidak dibangun dalam sekejap, namun memerlukan keuletan dan kemauan yang kuat. Dari sekian banyak perubahan positif diatas, perubahan yang sangat penting yaitu kesadaran untuk melakukan deteksi dini kanker rahim dan payudara, dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kegiatan serta keterlibatan saya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dulu kalau saya pergi ke sanggar atau kegiatan APM untuk mengikuti diskusi mapun pelatihan, sering dianggap perempuan yang tidak mengurus atau kurang memperhatikan anak dan keluarga. Begitu juga dengan kesadaran untuk deteksi dini kanker rahim dan payudara, dulu takut kalau mau mengajak perempuan lain karna sepertinya sangat pribadi. Namun sekarang saya sudah bisa menjelaskan dan mengajak perempuan lainnya untuk melakukan tes IVA dan Sadari secara berkala. Dengan saya berdaya, ternyata secara otomatis saya dapat berperan dengan baik dalam tiga ranah, yaitu pribadi, keluarga dan masyarakat.

Banyak harapan kedepan yang ingin saya wujudkan bersama teman- teman perempuan lainnya. Terutama di bidang penguatan ekonomi perempuan yang di kelola oleh dan untuk perempuan, sehingga perempuan akan memiliki otonom atas tubuh dan pikirannya yang pada akhirnya akan terbebas dari kekerasan ataupun ketidakadilan.

Anggaran Dana Desa Untuk Kesehatan Perempuan Dan Anak

Ditulis oleh: Helyesmi, Staf CP WCC Bengkulu



Saya seorang laki-laki bernama Zanili, dan orang-orang memanggil saya dengan nama kecil Zan. Saya tinggal di Kabupaten Seluma tepatnya di Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat. Perubahan yang saya alami selama bergabung di dalam diskusi Lembaga Cahaya Perempuan WCC adalah mendapat informasi mengenai HKSR dan mengenal CU yang dilaksanakan oleh Kelompok Harapan Bunda. Poin utama yang saya pahami bahwa perempuan lebih rentan terkena penyakit terkait reproduksinya seperti IMS, Kanker payudara, Anemia, Kematian Ibu dan Bayi serta gizi buruk. Ini disebabkan oleh ketidaktahuan informasi mengenai Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta tidak tahu cara mengolah makanan yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari.

Saya seorang Kepala rumah tangga dan memiliki 3 anak laki-laki. Selain menjadi kepala rumah tangga saya juga menjabat sebagai Kepala Desa Talang Tinggi. Program-program yang saya laksanakan bersama perangkat desa persentasinya 75% untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan hanya 25%. Sehingga yang kami laksanakan selama ini pembangunan jalan hotmix, kantor-kantor desa, paud/Tk dan lain-lainnya. Saya menyadari bahwa Desa Talang Tinggi memiliki kasus pernikahan usia anak yang cukup tinggi, KDRT dan KDP. Mulanya saya berfikir bahwa adanya posyandu setiap bulan sudah cukup untuk pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2016 awal mula saya mengenal lembaga Cahaya Perempuan WCC, awalnya mereka datang ke kantor Kepala Desa untuk mendiskusikan mengenai data yang mereka miliki terkait kasus

pernikahan anak yang terjadi di Desa Talang Tinggi. Saya merasa bahwa apa yang dijelaskan oleh WCC menjawab kekhawatiran saya selama ini. Mengingat baru saja terjadi kasus gizi buruk di Desa. Upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama dan memberikan informasi kepada warga desa, sejalan dengan program pemberdayaan yang ada di desa. Saya senang sekali karena WCC dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari perempuan dewasa yang sudah menikah, perempuan muda, dan laki-laki dewasa. Serta, WCC juga melibatkan pihak Puskesmas karena berkaitan dengan kesehatan perempuan.

Setelah itu di desa membentuk kelompok yang diberi nama CU Harapan Bunda yang setiap bulan kegiatannya adalah diskusi kritis dan penabungan. Sistem simpan pinjam yang besaran awalnya ditentukan oleh anggota kelompok sesuai dengan kemampuan anggota. Saya melihat keaktifan dari perempuan dewasa yang ada di desa. Mereka melakukan pertemuan di balai desa dan di rumah, terkadang saya turut ikut dalam diskusi mereka. Yang membuat saya senang adalah diskusi berjalan aktif, semua temuan mereka di rumah terkait permasalahan anak, suami, dan tetangga akan dibicarakan kasusnya bukan orangnya. Hal ini tentu secara langsung mengajak para anggota untuk mencari jalan keluar bersama. Pendamping lokal juga mempunyai pengetahuan yang sangat baik, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kelompok. Anggota kelompok juga meminjam uang CU sebagai modal usaha. Sehingga nampak perkembangan yang baik di desa.

Selain itu, ada juga diskusi kelompok untuk laki-laki dewasa yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Dengan agenda diskusi tentang HKSR, permasalahan terbaru yang ada di lingkungan desa, dan mendiskusikan bagaimana adat yang ada di desa yang sebenarnya berkaitan dengan HKSR. Kelompok laki-laki dewasa juga diberi pemahaman bahwa tugas rumah tangga, mengurus anak, dan berladang tidak bisa dibebankan sendiri pada istri. Harus ada kerjasama antara suami dan istri serta saling pengertian terkait alat kontrasepsi yang aman bagi istri.

Kelompok perempuan dan laki-laki muda juga aktif melakukan diskusi dengan isu yang bermacam-macam. Saya sendiri pernah kaget, karena melihat pengetahuan yang dimiliki oleh mereka tentang mencegah perkawinan anak. Kelompok ini paham perkawinan di usia anak akan berdampak pada tubuh perempuan, janin yang dikandung, anak yang dilahirkan, hingga perekonomian mereka. Saya sangat senang karena diskusi ini memotivasi anggota kelompok untuk menyelesaikan sekolah mereka.

Secara khusus saya berdiskusi bersama Lembaga Cahaya Perempuan WCC terkait pentingnya penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, keterampilan untuk menjadi pelaku usaha, perlunya melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan untuk balita, serta pemberian tablet tambah darah untuk perempuan dewasa dan muda. Selain itu saya juga merupakan pelindung dari CU harapan bunda dan sekaligus anggota FMS Kabupaten Seluma. Peningkatan kapasitas yang saya peroleh selama bergabung di FMS kabupaten seluma adalah:

- Pelatihan Kesehatan Reproduksi berspektif Gender
- Dialog FMS Kabupaten Seluma
- Lobby/Hearing mendesak peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan anak
- Lobby/Hearing mendesak peraturan bupati tentang gizi
- Advokasi dana desa untuk kesehatan perempuan dan anak

Perubahan yang paling dapat saya rasakan adalah saya memiliki kesadaran untuk mendorong istri saya aktif megikuti kegiatan di kelompok dan saya menggerakan perangkat desa, BPD, Pukesmas dan masyarakat untuk melakukan rembuk desa terkait apa saja yang akan dianggarkan untuk pengalokasian dana desa. Selain pembangunan fisik, saya juga meginginkan adanya penambahan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat terutama untuk kesehatan perempuan dan anak, dan juga penyuluhan sosialisasi untuk peningkatan perekonomian remaja produktif. Tujuannya supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengalami gizi buruk,

kurang darah, tidak ada lagi KDP, KDRT, mengurangi angka perkawinan usia anak, tidak ada lagi kematian ibu dan anak, dan perempuan dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Saya ingin agar tidak ada lagi yang mengidap penyakit yang menyerang tubuh perempuan.

Saat ini, serapan anggaran dana desa dapat sebanding dengan pembangunan fisik. Layanan posyandu juga semakin aktif dijalankan. Petugas puskesmas juga melayani keluhan-keluhan reproduksi perempuan dan laki-laki muda. Ketika ada yang berniat menikah tapi masih sekolah, saya akan mengajak kedua keluarga untuk berdiskusi apakah pernikahan ini bisa ditunda hingga si anak selesai sekolah. Di dalam ceramah agama dan diskusi adat saya juga meminta untuk disosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak.

Harapan saya semoga dengan adanya kelompok Harapan Bunda dan Kelompok Perempuan dan laki-laki muda Gempita, bisa membuat masyarakat yang lain juga memiliki perubahan untuk peduli terhadap kesehatan perempuan dan anak. Saya ingin Desa Talang Tinggi menjadi desa yang perduli pada HKSR, dan berupaya untuk mengurangi gizi buruk dan memastikan ibu dan anak sehat agar tidak ada AKI dan AKB. Ke depannya, semoga kepala desa lain juga dapat bersinergi untuk mengganggarkan dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan anak, dan Cahaya Perempuan WCC agar tetap mendampingi kelompok ini sampai informasi mengenai kesehatan reproduksi.

"Banyak Perubahan yang Saya Alami Ketika Menjadi Anggota Kelompok"

Ditulis oleh: Eva Lastari, Staf WCC Palembang



Perkenalkan, nama saya Purwanti, dilahirkan di Malang 42 tahun yang lalu. Saya sorang ibu rumah tangga yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pertama kali saya terlibat didalam program ini, pada waktu itu teman-teman dari WCC Palembang mengadakan sosialisasi di Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang tempat saya tinggal, pada saat itulah saya dan anggota yang lain melakukan musyawarah untuk pembentukan kelompok yang sekarang kelompok tersebut diberi nama kelompok "Maju Bersama".

Banyak sekali perubahan yang saya alami setelah bergabung menjadi anggota kelompok "Maju Bersama" Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim. Contoh kecil dari perubahan yang saya alami adalah, anak-anak saya dulu tidak mau membantu saya dalam hal pekerjaan rumah tangga dan sekarang setelah saya memberikan informasi yang saya dapat dari teman-teman WCC Palembang, anak saya mau membantu saya dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu rumah, dll. Awalnya anak saya malu karena sering diejek oleh teman-teman sebayanya karena membantu saya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, akan tetapi seiring waktu berjalan, anak saya justru merasa bangga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga.

Selain perubahan didalam lingkungan keluarga, saya juga merasakan perubahan di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal. Saya dipercaya oleh masyarakat untuk membantu mencari solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus KDRT yang dialami oleh warga sekitar diarea tempat saya tinggal. Beberapa orang tua sering berkonsultasi kepada saya mengenai pengasuhan anak dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan (suami).

Saya merasa sangat bersyukur karena atas program ini dan bergabung menjadi anggota kelompok, saya merasa kehidupan keluarga saya lebih teratur dan sehat karena ada pembagian peran didalam rumah

tangga sehingga saya tidak sendirian melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya dan pasangan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dasar di puskesmas termasuk test IVA. Di samping perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga yang saya alami, saya merasa lebih berwawasan, karena banyak pengetahuan yang saya dapatkan dalam diskusi kritis bulanan. Selain itu, silahtuhrahmi saya semakin baik dengan ibu-ibu di desa saya dan teman-teman saya bertambah tidak hanya dari desa saya tetapi dari desa lain bahkan dari kabupaten dan propinsi lainnya.

Ketika Aku Memutuskan Menjadi Caleg Perempuan (Refleksi Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput)

Ditulis oleh : Ana Yunita Pratiwi, Staf Damar Lampung



Indah Lestari, biasa disapa Indah. Sosok perempuan akar rumput yang terlahir 43 tahun lalu di Tanjung Karang, 23 Maret 1973. Ia tinggal di Kampung Tegal Ombo Kecamatan Waybungur Kabupaten Lampung Timur. Kampung yang sulit akses transportasi dan dikenal sebagai daerah kriminalitas tinggi. Salah satu kabupaten yang banyak menyumbang Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar Negeri.

Perempuan yang menamatkan pendidikan SMA pada tahun 1992 dan akhirnya memutuskan untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Terbuka pada 2008 setelah bergabung di Gerakan Perempuan Lampung. Pendidikan-pendidikan kritis yang diperoleh membuatnya menyadari bahwa pendidikan formal adalah prasayarat perempuan untuk memperoleh akses jaminan posisi strategis, posisi tawar dan menunjang dirinya untuk dapat berkontribusi untuk pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dengan semakin menguatkan perannya dalam kepemimpinan perempuan. Diawali pada tahun 2012 dengan menjadi kepala sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lalu tahun 2013 diajukan menjadi tutor Universitas Terbuka di kelompok belajar (pokjar) Waybungur. Dua kali ia memperoleh juara kepala sekolah berprestasi di Kab. Lampung Timur pada tahun 2013 dan 2016. Pada 2016, ia juga dimandatkan oleh Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Lampung Timur melalui musyawarah wilayah II menjadi Ketua Serikat Perempuan Lampung Timur.

Selain kemampuan mengorganisir, pendampingan korban, ia juga terlibat dalam proses-proses advokasi bersama Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Kegelisahan-kegelisahan semakin menguat ketika dihadapkan pada pengambil kebijakan yang tidak berpihak pada persoalan perempuan. Hingga pada 2018, ia maju menjadi calon legislatif perempuan karena dilamar oleh salah satu partai politik dan pada September 2018. Ia kemudian tercatat dalam daftar calon tetap peserta pemilu 2019.

Keberaniannya terlibat dalam kontestasi politik ini merupakan perubahan terpenting dalam dirinya dalam mengasah kapasitas kepemimpinan dan mewujudkan perubahan. Melalui program PERMAMPU dengan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput untuk advokasi kesehatan perempuan termasuk gizi, stunting dan HKSR dengan dukungan dari kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MAMPU). Upaya-upaya pemenangan caleg perempuan potensial dilakukan dengan beberapa strategi:

1. Pendidikan politik bagi perempuan potensial gerakan perempuan Lampung

2. Pendidikan Strategi serta Taktik Pemenangan Caleg Perempuan dari Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput
3. Pembuatan Alat Kampanye dalam rangka promosi caleg perempuan
4. Pertemuan-pertemuan pemenangan caleg perempuan dari FKPAR
5. Survey elektabilitas, alat kampanye, dalam pemenangan caleg perempuan

Ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas dan advokasi diantaranya:

1. Pesta Perayaan Gerakan Akar rumput "Kepemimpinan Perempuan untuk kesehatan keluarga, perempuan Muda dan perempuan desa tingkat Propinsi Lampung
2. Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan "Mewujudkan SDGs yang Responsif Gender danTransformatif"
3. Dialog Publik "Mimpi Calon Gubernur untuk Kemajuan Perempuan"
4. Lokalatih Kesehatan perempuan termasuk HKSR dan review SPM layanan Kesehatan bagi petugas kesehatan di 6 Kab/kota
5. Pertemuan Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan untuk Pembahasan Pengembangan Konsep Penyelenggaraan Pusat Perlindungan HKSR Perempuan –Untuk Pelayanan,Pengaduan dan Pembelajaran 6 Kabupaten/Kota"

Menjadi caleg perempuan adalah kali pertama pengalaman terlibat dalam pemilihan pimpinan publik.

"Saya yang benar-benar baru, ibaratnya lompatannya kejauhan. Tadinya saya seorang guru, lalu harus terjun ke dunia politik sehingga agak kaget. Di awal, saya kurang tertarik untuk terlibat menjadi peserta di pesta demokrasi ini. Bolak-balik saya yakinkan diri dan minta masukan suami untuk maju.

Banyak tantangan yang saya hadapi. Sebelumnya pasca ditetapkan oleh KPU dalam DCT, saya di laporkan oleh caleg lain ke Panwascam untuk melepaskan jabatan saya dari kepala sekolah (non PNS) dan tidak lagi menerima dana sertifikasi padahal itu lah pendapatan sehari-hari saya. Bahkan saya diminta mundur. Kedua, banyak keluarga memberikan respon setengah hati karena partai saya adalah PAN. Banyak orang-orang yang sebelumnya selalu meminta bantuan kepada saya, namun tidak memilih saya karena sesuatu yang instan (politik uang)

Saya telah melakukan program dari partai untuk sosialisasi sekaligus canvasing di 50 titik, jika diperkirakan tiap titik 20 orang artinya sekitar 1000 an orang yang ditemui. Namun kenyataannya di hasil akhir tetap saja terkena dampak pesta demokrasi. Dimana masyarakat benar-benar berpesta, mereka masih menerima serangan fajar/ money politik.

Pembelajaran lain, nomor urut saya 5 tetapi saya memperoleh suara urutan 3 (502 suara), padahal tanpa menggunakan atau menyebarkan uang (politik uang). Saya tahu no 1 dan 2 itu hampir menghabiskan dana 300 jt.

VISI KONSORSIUM PERMAMPU

Perempuan mengalami dan menikmati pemenuhan
perlindungan dan penghormatan
Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (KHSR) yang lebih baik.

TUJUAN 1

Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda/usia 12-20 tahun
mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi
untuk pemenuhan HKSR).

TUJUAN 2

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam
pelayanan HKSR yang mudah, cepat dan tepat dan bermutu.

TUJUAN 3

Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan
aturan adat dan tafsir agama
terkair HKSR (FMS).

TUJUAN 4

Pemerintah Desa dan Kab/Kota membuat kebijakan untuk
pemenuhan dan perlindungan HKSR.

WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



SEKRETARIAT PERMAMPU
Jl. Pancur Siwah No 1G Padang Bulan KM 8 Medan 20142 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 e-mail : konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org Facebook: PermampuConsurtium